

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok
Kompetensi

**MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
(PPKn)**

**Sekolah Menengah Pertama
(SMP)**

TERINTEGRASI PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER
DAN PENGEMBANGAN SOAL



**Edisi
Revisi
2018**

PEDAGOGI

Dasar-dasar Perencanaan
Pembelajaran, Penilaian dan
Penelitian Tindakan Kelas SMP

PROFESIONAL

Pengantar PPKn SMP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2018

**MODUL
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

**MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**TERINTEGRASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DAN PENGEMBANGAN SOAL**

KELOMPOK KOMPETENSI A

Penulis:

Drs. H. Haryono Adi Purnomo	PPPPTK PKn dan IPS
Drs. H. Supandi, M.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.	PPPPTK PKn dan IPS
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.	Universitas Negeri Malang
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum	Universitas Negeri Malang

Penyunting:

Gatot Malady, S.I.P., M.Si.

Desain Grafis dan Ilustrasi:

Tim Desain Grafis

Copyright © 2018
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Peta profil hasil UKG menunjukkan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG sejak tahun 2016 dan akan dilanjutkan pada tahun 2018 ini dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dilaksanakan melalui Moda Tatap Muka.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut



adalah modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru moda tatap muka untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru ini untuk mewujudkan Guru Mulia karena Karya.



Jakarta, Juli 2018

Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.

NIP. 196208161991031001



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Modul ini merupakan dokumen wajib untuk Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru merupakan tindak lanjut dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 dan bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar pada tahun 2018 melaksanakan review, revisi, dan mengembangkan modul paska UKG 2015 yang telah terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan terintegrasi pembelajaran berorientasi *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), serta berisi materi pedagogik dan profesional yang akan dipelajari oleh peserta selama mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan wajib bagi para peserta program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Pengembangan Soal untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik dan profesional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.



Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada para pimpinan PPPPTK IPA, PPPPTK PKn/IPS, PPPPTK Bahasa, PPPPTK Matematika, PPPPTK Penjas-BK, dan PPPPTK Seni Budaya yang telah mengizinkan stafnya dalam menyelesaikan modul Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Menengah Pertama ini. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada para widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), dosen perguruan tinggi, dan guru-guru hebat yang terlibat di dalam penyusunan modul ini.

Semoga Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu meningkatkan prestasi pendidikan anak didik kita.

Jakarta, Juli 2018

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar




Drs. Anas M. Adam, M.Pd.
NIP. 195808181984081001



Daftar Isi

	Hal.
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	x
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Cara Penggunaan Modul	5
BAGIAN I KOMPETENSI PROFESIONAL	15
Kegiatan Pembelajaran 1 Konsep, Materi, Struktur, dan Pola Pikir Keilmuan PPKn.....	15
A. Tujuan.....	15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	15
C. Uraian Materi.....	15
D. Aktivitas Pembelajaran.....	22
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	24
F. Rangkuman	26
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	27
Kegiatan Pembelajaran 2 Perumusan dan Penetapan Pancasila serta Dinamika Perwujudan nilai-nilai Pancasila	29
A. Tujuan.....	29
B. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi	29
C. Uraian Materi.....	29
D. Aktivitas Pembelajaran.....	45
E. Latihan Kerja/Tugas/Kasus	49
F. Rangkuman	50
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	52



Kegiatan Pembelajaran 3	53
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	53
A. Tujuan	53
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	53
C. Uraian Materi	54
D. Aktivitas Pembelajaran	64
E. Latihan/Kasus/Tugas	67
F. Rangkuman.....	69
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	71
Kegiatan Pembelajaran 4 Bentuk dan Kedaulatan Negara serta Lembaga- Lembaga Negara di Indonesia.....	73
A. Tujuan	73
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	73
C. Uraian Materi	73
D. Aktivitas Pembelajaran	87
E. Latihan /Kasus/Tugas	91
F. Rangkuman.....	92
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	93
Kegiatan Pembelajaran 5 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika.....	95
A. Tujuan	95
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	95
C. Uraian Materi	96
D. Aktivitas Pembelajaran	105
E. Latihan Kerja/Tugas/Kasus.....	108
F. Rangkuman.....	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	111
Kegiatan Pembelajaran 6 Harmoni Keutuhan Wilayah dan Kehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	113
A. Tujuan	113
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	113
C. Uraian Materi	113
D. Akitivitas Pembelajaran	121
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas.....	124



F. Rangkuman	125
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	126
BAGIAN II KOMPETENSI PEDAGOGI.....	127
Kegiatan Pembelajaran 7 Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran PPKn SMP	127
A. Tujuan.....	127
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	127
C. Uraian Materi.....	127
D. Aktivitas Pembelajaran.....	144
E. Latihan Kerja/ Kasus /Tugas	146
F. Rangkuman	148
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	149
Kegiatan Pembelajaran 8 Penyusunan Soal HOTS	151
A. Tujuan.....	151
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	151
C. Uraian Materi.....	151
F. Rangkuman	174
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	175
Kegiatan Pembelajaran 9 Perencanaan Pembelajaran PPKn SMP	177
A. Tujuan.....	177
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	177
C. Uraian Materi.....	177
D. Aktivitas Pembelajaran.....	184
E. Latihan Kerja/Tugas/kasus.....	186
F. Rangkuman	187
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	188
Evaluasi	189
Penutup	201
Daftar Pustaka	203



Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1. Ruang Lingkup Modul	4
Gambar 2. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka	5
Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In	6
Gambar 4. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In	8
Gambar 5 Bagan Lembaga-lembaga Negara	80
Gambar 7. Langkah-Langkah Pembelajaran Saintifik	129
Gambar 7 Ruang Lingkup Soal Level 1`	161
Gambar 8 Ruang Lingkup soal level 2	163
Gambar 9 Ruang Lingkup soal level 3	165
Gambar 10 Alur Penyusunan Soal HOTS.	169

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1. Daftar Lembar Kerja.....	11
Tabel 2. Kisi-kisi Pengembangan Soal USBN PPKn SMP	13
Tabel 3. Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi PPKn	21
Tabel 4. Deskripsi Langkah Pembelajaran	130
Tabel 5 Kata Kerja dan Deskripsi Perilaku yang Dapat Diukur	155
Tabel 6 Kata Kerja Ranah Sikap (Spiritual dan Sosial).....	157
Tabel 7: Kata Kerja Ranah Keterampilan	158
Tabel 8: Level kognitif pada soal	159



Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Guru Pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan dimanapun. Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah substansi materi yang dikemas guna membantu pencapaian peningkatan kompetensi, baik Pedagogi maupun profesional. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya.



Pendahuluan

Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

B. Tujuan

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama melalui pendekatan pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan dan kearifan lokal yang ada. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi Pedagogi dan profesional guru PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015 dan tahun 2016.

Kita akan mengajak Saudara, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi Pedagogi dan profesional. Materi Pedagogi berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran, RPP, Penyusunan Soal HOTS, serta Sumber dan Media Pembelajaran. Sedangkan materi profesional terkait dengan materi PPKn yang mencakup:

1. Konsep, struktur, materi dan pola pikir keilmuan PPKn.
2. Perumusan dan Penetapan Pancasila serta perwujudan nilai-nilai Pancasila.
3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bentuk dan Kedaulatan Negara serta Lembaga-lembaga Negara di Indonesia
5. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
6. Harmoni Keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI

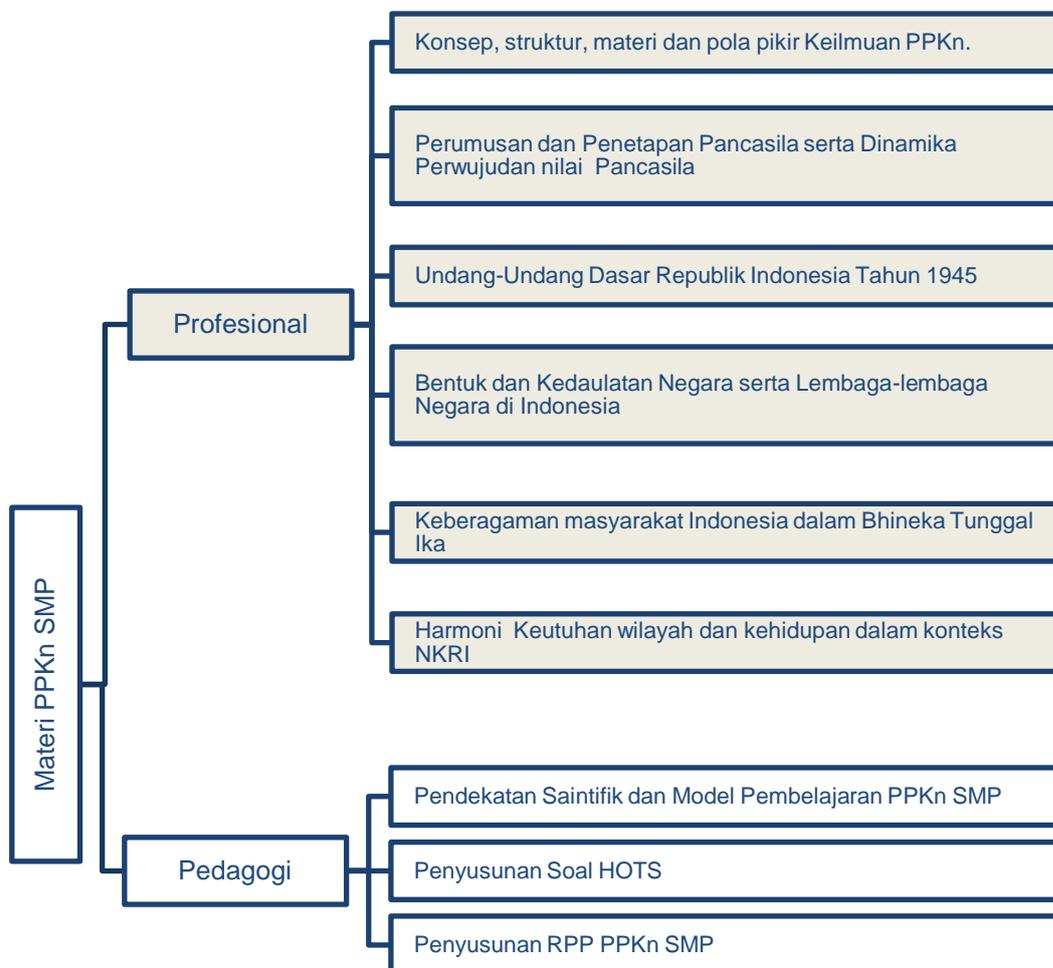
C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta mempelajari Modul ini adalah:

Pembelajaran ke -	Kompetensi yang dicapai
1.	Menguasai Konsep, struktur, materi dan pola pikir Keilmuan PPKn
2.	1. Menjelaskan sejarah Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menjelaskan Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3.	1. Menjelaskan Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menjelaskan Nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menjelaskan Lembaga-lembaga Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.	1. Menjelaskan Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 2. Menjelaskan Makna Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
6.	Menjelaskan Harmoni Keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI
7.	1. Menjelaskan Pendekatan Saintifik PPKn SMP 2. Menjelaskan Model Pembelajaran PPKn SMP
8.	Menjelaskan Penyusunan Soal HOTS
9.	Menjelaskan Perencanaan Pembelajaran PPKn SMP



D. Ruang Lingkup

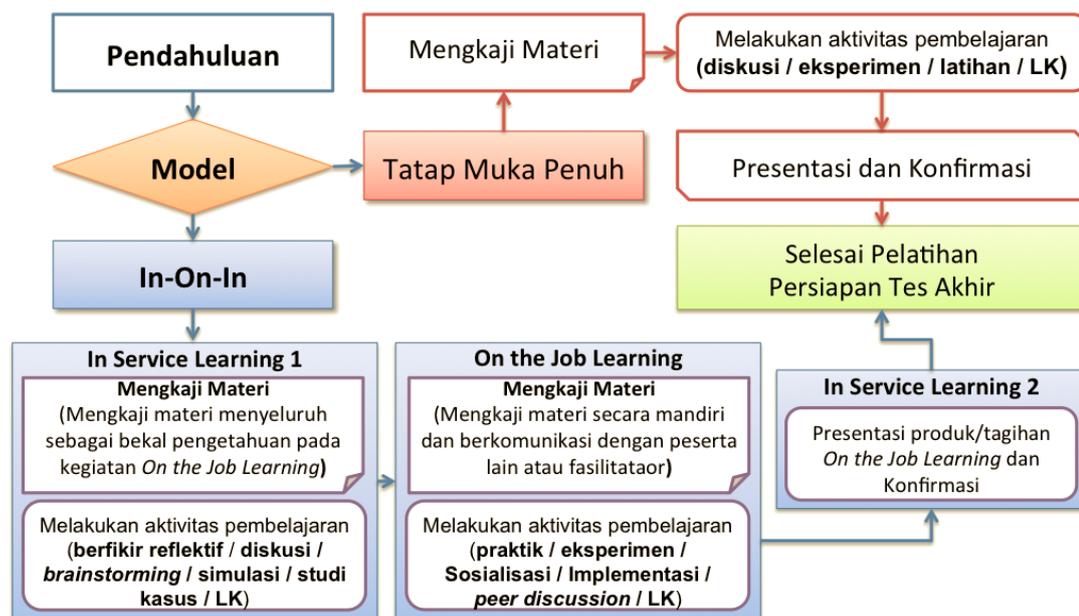


Gambar 1. Ruang Lingkup Modul



E. Cara Penggunaan Modul

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat. Modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In. Alur model pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



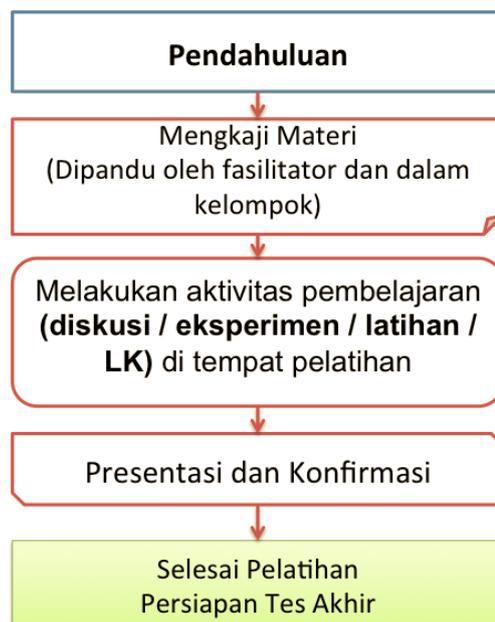
Gambar 2. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka

1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanakan secara terstruktur pada suatu waktu yang dipandu oleh fasilitator.

Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran yang dapat dilihat pada alur dibawah.

Pendahuluan



Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari :

- Latar belakang yang memuat gambaran materi
- Tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- Kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- Ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- Langkah-langkah penggunaan modul

b. Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi A Pengantar PPKn SMP dan Dasar-dasar Perencanaan Pembelajaran, dan Penyusunan Soal HOTS. Fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

c. Melakukan aktivitas pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan yang akan secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan bersama fasilitator dan peserta lainnya, baik itu dengan menggunakan diskusi tentang materi, melaksanakan praktik, dan latihan kasus.

Lembar kerja pada pembelajaran tatap muka penuh adalah bagaimana menerapkan pemahaman materi-materi yang berada pada kajian materi.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini juga peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data sampai pada peserta dapat membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran.

d. Presentasi dan Konfirmasi

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan sedangkan fasilitator melakukan konfirmasi terhadap materi dan dibahas bersama. Pada bagian ini juga peserta dan penyaji *me-review* materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

e. Persiapan Tes Akhir

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama, yaitu *In Service Learning 1* (In-1), *on the job learning* (On), dan *In Service Learning 2* (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat tatap muka In-On-In tergambar pada alur berikut ini.

Pendahuluan



Gambar 4. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan bertepatan pada saat pelaksanaan *In service learning 1* fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari :

- latarbelakang yang memuat gambaran materi
- tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- Ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- langkah-langkah penggunaan modul

b. In Service Learning 1 (IN-1)

- **Mengkaji Materi**

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi A Pengantar PPKn SMP dan Dasar-dasar Perencanaan Pembelajaran, Penilaian, dan Penelitian Tindakan Kelas, fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

- **Melakukan aktivitas pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metode yang secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi, *brainstorming*, simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui Latihan Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN-1.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mempersiapkan rencana pembelajaran pada *on the job learning*.

c. On the Job Learning (ON)

- **Mengkaji Materi**

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi A Pengantar PPKn SMP dan Dasar-dasar Perencanaan Pembelajaran, Penilaian, dan Penelitian Tindakan Kelas guru sebagai peserta akan mempelajari materi yang telah diuraikan pada *in service learning 1 (IN1)*. Guru sebagai peserta dapat membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada peserta.

- **Melakukan aktivitas pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah disusun pada IN-1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, *peer discussion* yang secara langsung dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja melalui tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada ON.

- **Mengerjakan Latihan Kerja/Tugas/Kasus**

Pada aktivitas pembelajaran materi pada ON, peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan melakukan pekerjaan dan menyelesaikan Latihan Kerja (LK) /Tugas/Kasus yang menjadi tagihan pada *on the job learning*.

d. In Service Learning 2 (IN-2)

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk tagihan ON yang akan di konfirmasi oleh fasilitator dan dibahas bersama. Pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-review materi yang dianggap sulit bagi peserta untuk dibahas bersama dengan fasilitator berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

f. Persiapan Tes Akhir

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

3. Latihan Kerja

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan kelompok kompetensi terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai pendalaman dan penguatan pemahaman materi yang dipelajari.

Modul ini mempersiapkan lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Lembar Kerja

No	Kode LK	Nama LK	Keterangan
1.	LK 1.1.	Konsep, Materi, Struktur, dan Pola Pikir Keilmuan PPKn	
2.	LK 2.1.	Perumusan dan Penetapan Pancasila serta Dinamika Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila	
3.	LK 2.2.	Membuat Kisi-kisi Soal dan Butir Soal USBN tentang Perumusan dan Penetapan Pancasila	
4.	LK 3.1.	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
5.	LK 3.2.	Membuat Kisi-kisi Soal dan Butir Soal USBN tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
6.	LK 4.1.	Kedaulatan Rakyat dan Lembaga-lembaga Negara	
7.	LK 4.2.	Membuat Kisi-kisi Soal dan Butir Soal tentang Kedaulatan Rakyat dan Lembaga-lembaga Negara	
8.	LK 5.1.	Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika	
9.	LK 5.2	Membuat Kisi-kisi Soal dan Butir Soal USBN tentang Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika	
10.	LK 6.1.	NKRI	
11.	LK 6.2.	Membuat Kisi-kisi Soal dan Butir Soal USBN tentang NKRI	
12.	LK 7.1.	Pendekatan Saintifik dan Model- Model Pembelajaran	
13.	LK 8.1.	Penyusunan Soal HOTS	
14.	LK 9.1.	RPP	



Pendahuluan

Keterangan

TM : Digunakan pada Tatap Muka Penuh

IN-1 : Digunakan pada *In service learning 1*

ON : Digunakan pada *on the job learning*



4. Kisi-kisi Pengembangan Soal USBN

Tabel 2. Kisi-kisi Pengembangan Soal USBN PPKn SMP

**KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

LEVEL KOGNITIF	LINGKUP MATERI		
	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	NORMA DAN KONSTITUSI	KOMITMEN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
Pengetahuan dan Pemahaman <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi • Menunjukkan • Menjelaskan • Mendeskripsikan 	Peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan Pancasila • Nilai-nilai dan moral dalam Pancasila • Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 	Peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 • Sistem perundang-undangan nasional • Sistem hukum nasional • Bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 • Norma-norma dalam masyarakat 	Peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Semangat Sumpah Pemuda 1928 • Kebangkitan Nasional 1908 • Aspek-aspek pengokohan NKRI • Persatuan dalam Keberagaman • Semangat cinta tanah air dan bela negara
Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> • Memberi contoh • Menentukan • Menerapkan • Menginterpretasi • Mengurutkan 	Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan Pancasila • Nilai-nilai dan moral dalam Pancasila • Pancasila sebagai dasar 	Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 • Sistem perundang-undangan nasional 	Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Semangat Sumpah Pemuda 1928 • Kebangkitan Nasional 1908 • Aspek-aspek pengokohan NKRI • Persatuan dalam Keberagaman

Pendahuluan

LEVEL KOGNITIF	LINGKUP MATERI		
	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	NORMA DAN KONSTITUSI	KOMITMEN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
	negara dan pandangan hidup bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem hukum nasional • Bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 • Norma-norma dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat cinta tanah air dan bela negara
Penalaran <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis • Mengevaluasi • Mengaitkan • Menyimpulkan 	Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam mengkaji: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan Pancasila • Nilai-nilai dan moral dalam Pancasila • Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 	Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam mengkaji: <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 • Sistem perundang-undangan nasional • Sistem hukum nasional • Bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 • Norma-norma dalam masyarakat 	Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam mengkaji: <ul style="list-style-type: none"> • Semangat Sumpah Pemuda 1928 • Kebangkitan Nasional 1908 • Aspek-aspek pengokohan NKRI • Persatuan dalam Keberagaman • Semangat cinta tanah air dan bela negara.

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok
Kompetensi

PROFESIONAL
Pengantar PPKn SMP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2018

Kegiatan Pembelajaran 1

Konsep, Materi, Struktur, dan Pola Pikir Keilmuan PPKn

A. Tujuan

1. Menguasai konsep, materi, struktur dan pola pikir keilmuan PPKn.
2. Menguasai ruang lingkup PPKn.
3. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
4. Memiliki komitmen moral dalam mengembangkan materi PPKn berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan latar belakang PPKn
2. Menjelaskan konsep PPKn
3. Menjelaskan tujuan mata pelajaran PPKn
4. Menjelaskan kedudukan mata pelajaran PPKn
5. Menjelaskan fungsi mata pelajaran PPKn
6. Menjelaskan manfaat mata pelajaran PPKn
7. Menjelaskan ruang lingkup PPKn

C. Uraian Materi

Latar belakang PPKn

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 2 menyebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan Pendidikan nasional berfungsi



Kegiatan Pembelajaran 1

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara dalam Pasal 37 disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Lebih lanjut, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk " membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Konsep PPKn

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terbaru yakni Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata pelajaran PPKn secara imperatif berkedudukan dan berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat lengkap.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh.

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMP, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, memiliki karakteristik sebagai berikut.



Kegiatan Pembelajaran 1

- a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter;
- c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual.
- e. Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*) yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.
- f. Model Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.



Kegiatan Pembelajaran 1

Kedudukan, Fungsi dan Manfaat Mata Pelajaran PPKn

PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia. Begitu pula, PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

Manfaat PPKn

Mata pelajaran PPKn bermanfaat untuk membangun manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Namun demikian dalam proses pembelajarannya perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (*democratic and lawful*). Hal ini berarti bahwa pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.

Fungsi PPKn

Mata pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui PPKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dalam kehidupan demokratis. Generasi penerus melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup PPKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn), meliputi:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan Permendikbud tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi PPKn

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
4	VII - VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila • Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 • Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI • Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila • Proses perumusan dan pengesahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI • Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4 A	IX	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari • Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang

Kegiatan Pembelajaran 1

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan 	<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Aspek-aspek pengokohan NKRI

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Peserta membaca modul KP 1 secara mandiri. Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis. 	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Peserta berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta. Peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya Peserta melakukan curah pendapat tentang fungsi dan kedudukan mata pelajaran PPKn Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> Peserta diklat mengelompok menjadi 3 kelompok (atau sesuai kebutuhan) Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya. 	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada. 2. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. 3. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 4. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur. 5. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 6. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 7. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 1 • Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. • Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
- 2) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 3) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 4) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 1.1 secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul ini.

c. Kegiatan In -2

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai



Kegiatan Pembelajaran 1

- 2) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 1.1 dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 3) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 4) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 5) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 6) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 1. 1.

Kerjakan dengan baik soal berikut ini!

1. Pilihlah salah satu ruang lingkup PPKn!
2. Tentukan ruang lingkup materi PPKn!
3. Isilah tiap ruang lingkup materi PPKn tersebut dengan Kompetensi Dasar PPKn SMP!

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Pada kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Latar belakang perubahan tersebut adalah, *kecuali*....
 - A. Mencoba kembali memasukkan pendidikan moral dan budi pekerti
 - B. Pancasila menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi.
 - C. PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila dirasa kurang.

- 
- D. Kecenderungan pembelajaran pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan belum dikembangkan secara optimal dan utuh.
2. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan
 - A. hak asasi manusia
 - B. hak-hak dan kewajiban
 - C. peraturan perundang-undangan
 - D. norma yang berlaku dalam masyarakat
 3. Mata pelajaran PPKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
 - A. menjadikan peserta didik yang cerdas dan terampil
 - B. membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila
 - C. menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - D. mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan; dan keterampilan kewarganegaraan.
 4. Ruang lingkup mata pelajaran PPKn meliputi...
 - A. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Demokrasi
 - B. Pancasila, NKRI, HAM, dan Bhinneka Tunggal Ika
 - C. Pancasila, NKRI, Demokrasi, dan Bhinneka Tunggal Ika
 - D. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
 5. Contoh substansi materi pengetahuan PPKn adalah...
 - A. Pengertian Hak Asasi Manusia
 - B. Hasil telaah pelanggaran Hak Asasi Manusia
 - C. Partisipasi dalam kampanye Hak Asasi Manusia
 - D. Laporan pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia

F. Rangkuman

1. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37. .
2. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia. Begitu pula, PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003
4. Mata pelajaran PPKn bermanfaat untuk membangun manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Namun demikian dalam proses pembelajarannya perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (*democratic and lawful*). Hal Ini berarti bahwa pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.
5. Mata pelajaran PKN harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui PKN sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dalam kehidupan demokratis.

6. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), meliputi:
 - a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
 - b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
 - d. *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 1, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dalam kegiatan pembelajaran di atas dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?



Kegiatan Pembelajaran 1

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, periksa jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 2. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 1 ini dengan baik.



Kegiatan Pembelajaran 2

Perumusan dan Penetapan Pancasila serta Dinamika Perwujudan nilai-nilai Pancasila

A. Tujuan

1. Menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3. Menjelaskan perkembangan penerapan Pancasila
4. Menjelaskan hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
5. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan

B. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar.
2. Peserta dapat menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar.
3. Peserta mampu menjelaskan perkembangan penerapan Pancasila dengan benar.
4. Peserta mampu menjelaskan hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan baik.
5. Peserta mampu memberikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan baik

C. Uraian Materi

1. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar negara

Suatu negara membutuhkan landasan yang kuat, yang berfungsi sebagai fondasi atau sebagai dasar negara. Dasar-dasar yang menjadi landasan suatu negara harus sesuai dengan karakter bangsa dan negara serta digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,





Kegiatan Pembelajaran 2

merupakan hasil perjuangan para pendiri negara (*founding fathers*), dimana perumusannya melalui proses yang tidak mudah.

Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu zyumbi Tyoosakai*, yang beranggotakan 63 orang, yang terdiri dari Ketua/ Kaicoo adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda/ Fuku Kaicoo Ichbngase (orang Jepang) dan seorang ketua muda dari Indonesia R.P. Soeroso.

Setelah BPUPKI terbentuk, sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada persidangan inilah dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai. Usulan yang dikemukakan berbeda-beda, namun demikian peserta sidang saling menghormati, memiliki komitmen moral untuk merumuskan dasar negara dan bekerja keras. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui dikarenakan baru 3 pidato yang ditemukan teksnya secara lengkap, yaitu yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno.

Berikut merupakan pandangan beberapa tokoh dalam perumusan Pancasila :

a. Mr. Mohammad Yamin

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Mr. Soepomo

Mr. Soepomo mengemukakan pemikirannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Soepomo menguraikan teori-teori negara atau juga dikenal dengan teori landasan yang digunakan untuk mendirikan negara, sebagai berikut:

- 1) Teori negara perseorangan (individualistik) sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rouesseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), Hj. Laski (abad 20), yang menegaskan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*Legal Society*) yang disusun atas kontrak seluruh individu (*Contract Social*)
- 2) Paham negara kelas (*Class Theory*) atau Teori Kolektivisme, yang diajarkan oleh Karl Marx, F. Engels, Lenin. Negara tidak lebih hanyalah “instrument” atau alat. Alat kelas yang berkuasa (borjuis – kapitalis) untuk menindas kelas yang tidak berdaya (buruh - proletar), karena itu kaum proletar harus bersatu mengalahkan kaum borjuis. Merebut kekuasaan, kemudian ganti menindas kaum penindas.
- 3) Paham negara integralistik. Negara yang didirikan seperti yang diajarkan oleh Hegel, Adam Muller, Spinoza. Jika teori pertama Negara dibentuk untuk menjamin kepentingan individu. Teori kedua, negara dibentuk untuk menjamin kepentingan golongan (kelompok), maka teori integralistik menjamin kepentingan keseluruhan (totalitas). Negara menjamin kepentingan keseluruhan sebagai “persatuan organis”, semua unsur berhubungan sebagai satu kesatuan. Negara menjamin penghidupan seluruh negara, tidak memihak golongan yang kuat, paling besar, dan tidak menjadikan kepentingan individu sebagai pusat. Negara menjamin dan melindungi kepentingan keseluruhan sebagai suatu persatuan yang utuh.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan filsafat negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut :



Kegiatan Pembelajaran 2

- 1) Negara tidak menyatukan diri dengan golongan terbesar, terkuat, tapi mengatasi semua golongan besar atau kecil. Dalam Negara yang bersatu seperti itu maka urusan agama diserahkan pada golongan – golongan pemeluk agama yang bersangkutan.
- 2) Hendaknya para warga negara beriman takluk kepada Tuhan. Setiap waktu selalu ingat pada Tuhan.
- 3) Negara Indonesia hendaknya berdasarkan kerakyatan, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan, dengan begitu kepala negara senantiasa tahu dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Kepala negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat.
- 4) Dalam penyelenggaraan bidang ekonomi hendaknya ekonomi Negara bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan sifat masyarakat timur yang harus dijunjung tinggi. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dijadikan dasar ekonomi Negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.
- 5) Negara Indonesia hendaknya melakukan hubungan antar negara, antar bangsa. Soepomo mengajarkan supaya negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya, sebab Indonesia menjadi bagian kekeluargaan Asia Timur Raya.

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila sebagai berikut :

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan Lahir dan Batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan Rakyat

c. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk

mengemukakan pendapatnya yang terdiri dari lima asas sebagai berikut ini :

1. Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme)
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila” atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa. Berikutnya kelima sila tersebut bisa diperas menjadi “Tri Sila” yaitu: (1) sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari Sila kebangsaan dengan peri kemanusiaan, (2) Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Sila mufakat atau demokrasi dengan Kesejahteraan Sosial, dan (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.

Beliau mengusulkan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa atau “*Philosophische grondslag*” juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau dikenal sebagai “*weltanschauung*” dan di atas dasar itulah kita didirikan. Selanjutnya 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

Dari sidang BPUPKI yang pertama, bisa ditarik kesimpulan bahwa segenap tokoh pendiri bangsa (*founding fathers*) berusaha untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi tumpuan utama bagi kokohnya bangsa Indonesia. Setiap tokoh walaupun memiliki pemikiran yang tidak persis sama, akan tetapi memiliki satu pemikiran yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, dimana setiap usulan yang ada tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Secara garis besar ada beberapa persamaan yang bisa kita simpulkan dari berbagai pandangan dari ketiga tokoh tersebut, antara lain :

- 1) Semua para pendiri bangsa berpikir tentang bagaimana memajukan suatu negara agar bisa menjadi makmur dan sejahtera



Kegiatan Pembelajaran 2

- 2) Ingin menyatukan NKRI, menciptakan kesetaraan sosial, membuat dasar negara yang kokoh dari ancaman bangsa lain, dengan kata lain sama sama memiliki cita cita besar untuk bangsa dan negara ini
- 3) Sama-sama mementingkan orang banyak/rakyat, tujuannya sebagai pemersatu, ada unsur Tuhan didalamnya, kesejahteraan rakyat, keadilan, bermusyawarah
- 4) Dasar negara harus selaras dengan struktur, budaya dan kepribadian bangsa.

Lahirnya Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan berhasil merumuskan dan menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar (UUD) yang diberi nama “*Mukaddimah*” oleh Ir. Soekarno, *Piagam Jakarta* atau *Jakarta Charter* oleh Mr. Mohammad Yamin, dan “*Gentlemen’s Agreement*” oleh Sukiman Wirjo Sandjojo, yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10-17 Juli 1945.

Piagam Jakarta berisi:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945
 Ir. Soekarno
 Drs. Moh. Hatta
 Mr. A.A. Maramis
 Abikoesno Tjokrosoejoso
 Abdul Kahar Moezakkir
 Agoes Salim
 Mr. Achmad Soebarjo
 K.H. Wachid Hasjim
 Mr. Moh. Yamin

(Mohamad Anas.dkk, 2017: 138)

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)

- Pada sidang hari pertama muncul berbagai tanggapan mengenai bentuk negara, yang akhirnya disetujui bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara republik. Persetujuan yang telah disepakati bersama ini merupakan sikap perilaku yang menggambarkan keteladanan dalam menerima keberbedaan pendapat.
- Sebagai ketua Panitia Kecil, Ir. Soekarno melaporkan berbagai usul yang telah dirumuskan dalam Rancangan Preambul Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang telah ditandatangani oleh sembilan orang Panitia Kecil.
- Menyetujui Rancangan Preambule yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta.
- Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang berkewajiban merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD.
- Berdasarkan dua keputusan tersebut berarti Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD yang akan dipergunakan.
- Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli 1945
- Rapat Pleno Badan Penyelidik pada tanggal 14 Juli 1945 menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selaku ketua, Soekarno melaporkan tiga hasil rapat panitia yang meliputi:
 1. Pernyataan Indonesia merdeka
 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
 3. Undang-Undang Dasar/ Batang Tubuh
- Sidang Badan Penyelidik pada tanggal 16 Juli 1945 menerima secara bulat seluruh Rancangan Hukum Dasar, yang sudah selesai dirumuskan dan disepakati sebagai Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia yang akan didirikan, yang memuat di dalamnya Jakarta Charter sebagai Mukaddimahnya.
- Tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI telah menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan dan kemudian dibentuk badan baru yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau "*Dokuritsu Ziumbi linkai*"

Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang pertamanya (PPKI melakukan 3 kali masa persidangan, yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945).

1) Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

Untuk merealisasikan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ketua dan anggota PPKI berkumpul untuk mengadakan sidang, dimana pada sidang pertama ini dihasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI.
3. Membentuk Komite Nasional Pusat untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Adapun perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
Kata Mukaddimah	Pembukaan
Dalam suatu Hukum Dasar	Dalam suatu UUD negara ...
...dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
...menurut kemanusiaan yang adil dan beradab	...kemanusiaan yang adil dan beradab
...dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia...	...dalam suatu UUD Negara Indonesia...
pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam	Presiden adalah orang Indonesia asli.
pasal 29 ayat 1 “dengan kewajiban dan lain-lain”	mencoret kalimat “dengan kewajiban dan lain-lain”

Selanjutnya Moh. Hatta menjelaskan perubahan-perubahan berkenaan dengan pasal 4 ayat 2, pasal 5, pasal 6 ayat 2, pasal 7, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, pasal 9, pasal 33, pasal 24 pasal 25 dan pasal 26.

Tanggal 18 Agustus merupakan perjalanan sejarah paling menentukan



Kegiatan Pembelajaran 2

bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut.

Namun demikian sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting. Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamasikan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/ Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka. Pesan tersebut, kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah

Ketika itu Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja dicapai. Jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan daerah (Indonesia) luar Jawa akan kembali dikuasai oleh kaum Kolonial Belanda. Akhirnya bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat atau tujuh kata "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka

juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai.

Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan inilah kemudian dijadikan dasar negara hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun. Jika mengubah dasar negara Pancasila berarti membubarkan negara hasil proklamasi (tap MPRS No. XX/MPRS/1966).

Untuk mengamankan rumusan sila-sila Pancasila yang benar dan sah maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 yang isinya menegaskan bahwa pengucapan dan penulisan Pancasila adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya dikeluarkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan dinyatakan di dalamnya bahwa Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila pun menjadi sumber hukum dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 Pasal 1 ayat (3).

2) Sidang PPKI Kedua

Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ini menghasilkan dua keputusan :

- a) Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
 - 1) Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
 - 2) Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo
 - 3) Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo
 - 4) Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
 - 5) Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
 - 6) Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo
 - 7) Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara
 - 8) Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri
 - 9) Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi
 - 10) Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyo
 - 11) Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
 - 12) Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

- b) Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi
 - (1) Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
 - (2) Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso
 - (3) Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo
 - (4) Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
 - (5) Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
 - (6) Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
 - (7) Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
 - (8) Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan

3) Sidang PPKI Ketiga

Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 membicarakan soal pembentukan Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.

Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sejak semula dimaksudkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Karena landasan ini merupakan landasan yang sangat penting, maka Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Nilai Juang Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Berdasarkan uraian materi di atas, proses perumusan Pancasila melewati tahapan yang tidak mudah, dikarenakan terdapat berbagai pendapat dan pandangan yang berbeda. Tanpa melalui rasa persatuan dan semangat kemerdekaan, segala perbedaan yang ada dapat semakin menghancurkan bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang berjuang dalam meraih kemerdekaannya. Dengan sikap kenegarawanan para tokoh, pada akhirnya proses perumusan Pancasila dapat mencapai kesepakatan bersama, yang dijadikan sebagai landasan bagi bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan karya besar para tokoh-tokoh besar pendiri negara yang “digali” dari ibu Pertiwi. Hasil “renungan” sedalam-dalamnya dari dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Konsensus bersama, janji para pahlawan tokoh nasional, komitmen untuk menjadi suatu sistem yang diyakini kebenarannya, serta menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur Pancasila terlahir dari sikap dan tindakan luhur para bapak bangsa. Mustahil pikiran besar lahir dari manusia yang tidak memiliki konsepsi besar, jiwa besar, kemampuan membaca tanda-tanda jaman dalam memperjuangkan masa depan menjadi lebih baik. Namun tetap kuat berakar pada jati diri kepribadian bangsa sendiri sosio-budaya sendiri. Karena itulah generasi penerus perlu meneladani menjadikannya “panutan” dalam bertutur, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perkembangan Penerapan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada hakekatnya merupakan suatu konsensus nasional para pendiri negara. Menurut Winarno (2010) Pancasila merupakan janji ksatria (*Gentlemen Agreement*) sebagai kontrak sosial yang mengikat warga bangsa. Dengan demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. .Dinamika perkembangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1) Penerapan Pancasila Di Era Orde Lama

Penerapan Pancasila dapat dilihat pada awal kemerdekaan 1945 – 1965 sebagai tahap penerapan yang bersifat politis, mengingat pada saat tersebut orientasi penerapan Pancasila diarahkan kepada *Nation and Character Building*. Pancasila memang telah menjadi dasar negara namun dalam penerapannya masih banyak kendala. Berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain terjadi, berupa pemberontakan daerah

2) Penerapan Pancasila Di Era Orde Baru

Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

3) Penerapan Pancasila di era Reformasi

Selama Orde Reformasi telah dipimpin 6 Presiden yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko widodo menempatkan Pancasila secara formal tetap sebagai dasar dan ideologi negara, namun masih sebatas pada retorika pernyataan politik.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara.

Beberapa faktor yang mendorong gagasan dan pikiran menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagaimana pandangan Moerdiono (1992:400) yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat.
- 2) Runtuhnya ideologi tertutup Marxisme-Leninisme/Komunisme.
- 3) Praktik Ideologi tertutup di masa lalu.

4) Penempatan Pancasila sebagai Asas Tunggal.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berangkat dari pemikiran betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi terbuka yakni sebagai suatu upaya agar tetap relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sebagaimana dikemukakan oleh Alfian yang disitir Untari (2012) yang mengemukakan bahwa ideologi perlu mengandung tiga dimensi penting di dalam dirinya agar supaya dapat memelihara relevansinya yang tinggi/kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakatnya dan tuntutan zaman, harus mengandung: (1) dimensi realita, (2) dimensi idealisme, dan (3) dimensi Fleksibilitas.

Macam-macam Nilai dalam Pancasila

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagaimana dikemukakan Murdiono yang dirujuk Untari (2012) yakni sebagai berikut:

1) *nilai dasar*,

Nilai dasar hakekatnya adalah kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945; Oleh karena setiap peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. (nilai taat hukum, menghargai nilai dasar, komitmen atas keputusan bersama)

2) *nilai instrumental*

Nilai instrumental merupakan nilai yang memberikan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yang penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, seperti penetapan GBHN, UU, struktur kelembagaan, dan sebagainya. Sikap



Kegiatan Pembelajaran 2

positif sebagai warga negara yang baik harus menaati ketentuan peraturan perundangan yang ada. (Nilai taat hukum, disiplin, komitmen atas keputusan bersama)

3) *nilai praktis*

Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi). (Kaelan, 2003).

Menurut Winarno. S (2007:6) Disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah sila-sila Pancasila itu sendiri yang memuat doktrin mendasar sebagai berikut:

- b. Religiositas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang hubungan manusia dengan dzat mutlak, apapun predikatnya.
- c. Humanitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang posisi manusia dengan sesamanya. Interdependensi antar manusia sejalan dengan harkat dan martabat dalam menciptakan justice dan keberadaannya sebagai makhluk tertinggi ciptaanNya.
- d. Nasionalitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* bahwa insan yang berada diatas geografis nusantara ini disebut dan layak sebagai bangsa. Loyalitas tunggal, heroisme, patriotisme, bela negara merupakan hubungan mutlak warganegara dengan nation-state Indonesia.. Oleh karena sikap dan perilaku warga negara Indonesia harus berani membela kebenaran, menjaga lingkungan sosial dan lingkungan alam, cinta tanah air. (nilai keberanian, nilai cinta tanah air, komitmen moral terhadap keutuhan NKRI)
- e. Soverenitas, memuat gagasan , ide dan *fundamental value* bahwa yang berdaulat di NKRI adalah rakyat. Negara Indonesia negara demokrasi, sehingga segala sesuatunya berasal dari oleh dan untuk rakyat. Karena Indonesia roh demokrasinya Pancasila, maka memiliki ciri khas, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- f. Sosialitas, memuat gagasan ide dan *fundamental value* tentang manusia “diseberang jembatan emas” kemerdekaan yang menjadi tujuan berdirinya NKRI adalah bangsa yang berbahagia sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah keadilan perorangan atau sekelompok. Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu.

Penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus terus dilakukan terlebih di era persaingan bebas seperti saat ini, untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penguatan dan dinamisasi kehidupan masyarakat agar berkembang mekanisme sosial yang mampu menanggapi dan mencari solusi problem bangsa yang muncul dengan inovasi, kreasi dan kompetisi
2. Perlunya demokratisasi dalam aspek kehidupan masyarakat, sehingga mampu membentuk warganegara yang dewasa dan mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Reformasi, refungsionalisasi kelembaga negara dan lembaga –lembaga masyarat, agar sistem politik berjalan sesuai dengan dasar negara dan konstitusi

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta membaca modul KP 2 secara mandiri. • Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis. 	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta. • Peserta menyanyikan lagu Garuda Pancasila • Peserta melakukan curah pendapat tentang Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan • Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mengelompok menjadi 3 kelompok (atau sesuai kebutuhan) 	

Kegiatan Pembelajaran 2

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya. 3. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada. 4. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. 5. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 6. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur. 7. Peserta menyusun soal USBN, 3 soal pilihan ganda dan 3 soal subyektif berdasarkan LK.1.3. 8. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 9. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 10. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 2 • Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. • Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama
- 2) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 3) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 2.1 dan LK 2.2 secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 2.1 dan LK 2.2, sedangkan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK. 2.1.

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik.

1. Deskripsikan proses perumusan Pancasila, dari sidang BPUKI yang pertama sampai yang tertera pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Pelajaran penting apa yang bisa diambil dari sikap Para Tokoh yang legawa menghilangkan 7 kata pada sila pertama oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?

Kegiatan Pembelajaran 2

LK. 2.2.

AKTIVITAS PENGEMBANGAN BUTIR SOAL USBN

Prosedur:

1. Cermatilah kisi-kisi untuk penyusunan soal USBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam tabel 4.
2. Buatlah kisi-kisi soal UN/USBN pada lingkup materi yang dipelajari sesuai format di bawah ini!
3. Buatlah soal USBN pada lingkup materi yang dipelajari pada modul ini berdasarkan kisi-kisi yang telah Saudara kembangkan!
4. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTS berdasarkan acuan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran 8.
5. Buatlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 3 soal!
6. Buatlah soal uraian (Essay) sebanyak 3 soal!

Format Kisi-Kisi Soal

No. Urut	Kompetensi Dasar	Bahan Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1.		VIII	Proses Perumusan Pancasila		PG dan Essay Level pengetahuan dan pemahaman
2.		VIII	Proses Perumusan Pancasila		PG dan Essay Level Aplikasi
3.		VIII	Proses Perumusan Pancasila		PG dan Essay Level Penalaran

Format Kartu Soal

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas	: VII
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan pemahaman

Materi	:
Bentuk soal	: Pilihan Ganda/Essay
Soal	
Kunci Jawaban	

E. Latihan Kerja/Tugas/Kasus

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Sidang BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sd 1 Juni 1945 membahas tentang....
 - A. bentuk negara
 - B. dasar negara Indonesia
 - C. sistem pemerintahan Negara Indonesia
 - D. batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Istilah Pancasila lahir 01 Juni 1945, tetapi sebagai dasar negara secara hukum ditetapkan pada tanggal
 - A. 30 Mei 1945 dibahasnya dasar negara dalam sidang BPUPKI
 - B. 01 Juni 1945 digalinya nilai-nilai Pancasila oleh pendiri negara
 - C. 17 Agustus 1945 karena telah dideklarasikan proklamasi kemerdekaan
 - D. 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh PPKI dimana UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI

3. Mr. Muhamad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk



Kegiatan Pembelajaran 2

mengemukakan pidatonya yang berisi lima asas dasar untuk Indonesia Merdeka pada sidang BPUPKI. Salah satu sila yang diusulkannya adalah

- A. Kesejahteraan rakyat
 - B. Kebangsaan Persatuan Indonesia
 - C. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Contoh perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai Pancasila dalam berdiskusi, antara lain...
- A. bebas menyampaikan pendapat
 - B. menyampaikan pendapat yang berbeda
 - C. menyampaikan pendapat secara spontan
 - D. berbicara setelah dipersilahkan moderator
5. Pernyataan:
- 1) Sistem pemikiran yang terbuka
 - 2) Nilai-nilainya berasal dari nilai budaya masyarakat
 - 3) Sistem pemikirannya tertutup
 - 4) Pada hakekatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa
- Yang menjadi ciri ideologi terbuka adalah
- A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 2 dan 4
 - D. 3 dan 4

F. Rangkuman

1. Pancasila merupakan lima prinsip kebijaksanaan hidup dalam berbangsa bernegara. Pancasila merupakan fondasi atau dasar negara bagi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari jiwa bangsa.

2. Para tokoh bangsa Indonesia telah berjuang untuk mengemukakan berbagai macam pendapat dan pemikiran terbaiknya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
3. Pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) telah menghasilkan dasar negara dimana terdapat ketiga tokoh bangsa yakni Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno yang menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka.
4. Panitia sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohammad Yamin yang akhirnya terdapat persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.
5. Hasil sidang BPUPKI kedua ini menghasilkan (1) pernyataan Indonesia merdeka (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar dan (3) Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh
6. Sidang PPKI dilakukan selama 3 kali masa persidangan, Sidang PPKI Pertama tanggal 18 Agustus 1945 (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.(2) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama) (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.
7. Sidang PPKI Kedua 19 Agustus 1945 (1) Membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya, dan (2) Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi. Sidang PPKI Ketiga yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 membicarakan soal pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.
8. Sikap baik sesuai Pancasila artinya dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari selalu berpedoman atau berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
9. Perilaku baik sering dinamakan akhlakul karimah, akhlak mulia yakni perilaku yang senantiasa mengindahkan aturan, norma dan hukum yang berlaku. Sebaliknya perilaku buruk jika tata tutur,sikap perilaku yang bertentangan nilai-nilai Pancasila.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 2, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, periksa jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 3. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 2 dengan baik.



Kegiatan Pembelajaran 3

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan

1. Menjelaskan sejarah perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjelaskan sejarah pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
4. Menjelaskan semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan.
5. Menjelaskan isi alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Menjelaskan hakekat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar
8. Menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta dapat menjelaskan sejarah perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peserta dapat menjelaskan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Peserta dapat menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.





Kegiatan Pembelajaran 3

4. Peserta dapat menjelaskan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peserta dapat menjelaskan semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan
6. Peserta diklat dapat menjelaskan isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Peserta diklat dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Peserta diklat dapat menjelaskan hakekat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar.
9. Peserta diklat dapat menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

C. Uraian Materi

Sejarah Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPUPKI menyelenggarakan Sidang Pleno/Paripurna sebanyak dua kali periode yaitu periode pertama tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945, dan periode kedua tanggal 10 s.d 17 Juli 1945.

Pada Sidang Pleno pertama selama empat hari digunakan untuk menyampaikan “pemandangan umum” bagi para anggota. Hal itu sesuai dengan anjuran Ketua Badan Penyelidik agar para anggota menyampaikan pandangan-pandangan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sebenarnya dalam sidang pertama ini ada beberapa orang pembicara, tetapi ada tiga orang yang secara dominan mempunyai pengaruh yaitu Muh. Yamin, Prof.Dr.Mr. Supomo dan Ir. Sukarno (Muh. Yamin, 1959:59).

Sela waktu antara Sidang periode pertama (29 Mei s.d. 1 Juni 1945) dan periode kedua (10 Juli s.d. 17 Juli 1945) dimanfaatkan oleh tiga puluh delapan orang anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota *Cuo Sangiin* (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang, sehingga di sebut “Panitia Sembilan”. Pembentukan

Panitia Sembilan ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan dari para anggota Badan Penyelidik (golongan Islam dan golongan kebangsaan) untuk mencari persamaan wawasan tentang dasar negara Indonesia medeka. Tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil mencapai persetujuan atau permufakatan bersama yang tertuang dalam sebuah naskah yang dikenal dengan “Piagam Jakarta”, yang sering juga disebut “Jakarta Charter”.

Sejarah menunjukkan bahwa Piagam Jakarta (22 Juni 1945) itu kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sedikit perubahan pada rumusan kalimat ...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”... diubah dan ditetapkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” setelah melalui pembahasan secara seksama dan mendalam. Rumusan baru itu merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan dalam sidang Badan Penyelidik pada tanggal 11 Juli 1945.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Ketua Ir. Sukarno dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945 membentuk Panitia Kecil yang terdiri atas Ketua Supomo, anggotanya Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Salim dan Sukiman (tujuh orang). Kewajiban Panitia Kecil adalah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dimajukan di Sidang maupun dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (Muh. Yamin, 1959:260). Dalam rapatnya tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk “Panitia Penghalus Bahasa” terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim dan Supomo.

Penetapan/Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang PPKI yang dihadiri oleh 27 orang di bawah kepemimpinan Bung Karno (Ketua) dan Bung Hatta (Wakil Ketua). Dalam sidang PPKI tersebut telah diambil keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara yaitu:

- 1) Menetapkan dan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



Kegiatan Pembelajaran 3

- 2) Memilih Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
- 3) Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Arti penting adalah bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang:

- a. hak-hak asasi manusia;
- b. hak dan kewajiban warga negara;
- c. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- d. wilayah negara dan pembagian daerah; kewarga-negaraan dan kependudukan; keuangan negara.

Perubahan/Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada sidangnya pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pembukaan

Istilah “Mukadimah” atau kata “Pembuka Undang-Undang Dasar” diganti dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kalimat...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya...” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.

2) Perubahan pada pasal-pasal

a) Pasal 4:

- Ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata “menurut Undang-Undang Dasar”.

- Ayat (2): perkataan “dua orang wakil Presiden”, menjadi “satu wakil Presiden”. Alinea 3 dicoret.
- b) Pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- c) Pasal 6
- Ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.
 - Ayat (2) menjadi: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi wakil-wakil).
- d) Pasal 7, menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden
- e) Pasal 8, diubah sehingga masuk kalimat: ia diganti oleh Wakil Presiden
Pasal 8 ini tidak lagi memakai ayat (2) lagi.
- f) Pasal 9, kalimat pertama ditambah dengan: Presiden dan Wakil Presiden.
Perkataan “mengabdikan” diganti dengan kata “berbakti” (dua kali) seperti rumusan sekarang.
- g) Pasal 23:
- Ayat (1) ditambahkan kalimat “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.
 - Ayat (5) ditambahkan kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan perwakilan rakyat”.
- h) Pasal 24:
- Ayat (1) ditambahkan kalimat “menurut Undang-Undang”.
- i) Pasal 25: ditambahkan kata “dan untuk diberhentikan”.
- j) Perubahan lain

Menjelang akhir sidang, Ketua (Bung Karno) menanyakan kepada anggota, apakah masih ada usul lagi?, maka Iwa Kusumasumantri menyatakan ada satu usul:

....Berhubung dengan pernyataan dari pimpinan, maka benarlah bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Akan tetapi meskipun demikian, ada syarat-syarat dari suatu Undang-Undang Dasar yang tidak boleh kita lupakan. Nanti saya kemukakan beberapa pasal, yang saya harap tidak akan menimbulkan perbantahan, karena maksudnya ialah untuk sedikit memperbaiki bangunannya saja. Salah satu perubahan yang akan saya



Kegiatan Pembelajaran 3

tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang “Perubahan Undang-Undang Dasar”. Di sini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya masih perlu diadakan (Muh. Yamin, 1959:412).

Berkaitan dengan hal itu maka sidang memutuskan untuk menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:

- a) Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
- b) Aturan Peralihan pasal I, II, III, IV.
- c) Aturan Tambahan ayat (1) dan (2).

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memang telah ada perubahan. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan tidak termasuk obyek perubahan sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah.(nilai komitmen atas keputusan bersama, komitmen moral)

Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental, karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk/ditentukan oleh para pendiri negara Indonesia/pembentuk negara, yaitu oleh PPKI. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar-dasar dibentuknya negara yaitu:

1. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia.
2. Negara berdiri di atas segala paham golongan, suku, dan paham perorangan. Negara menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia.
3. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
4. Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan.
5. Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengatur dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara, serta menetapkan adanya UUD negara. Secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Dasar cita-cita kerohanian yaitu Pancasila (asas falsafah negara) falsafah negara;
2. Asas politik yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
3. Tujuan negara tertuang pada alinea keempat: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Isi Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.



Kegiatan Pembelajaran 3

Setiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa, dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Isi tiap-tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah:

a. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Alinea ini menunjukkan keteguhan dan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, melainkan juga bahwa Indonesia akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu sikap yang obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Inilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif yaitu aspirasi bagi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Uraian di atas meletakkan tugas dan kewajiban kepada bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Sudah jelas pendirian yang demikian tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan tetap menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri.

Mengapa bangsa Indonesia menentang penjajahan? Karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Berarti, setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus ditentang oleh bangsa Indonesia.

b. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Isi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Hal ini juga berarti adanya kesadaran tentang keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Dari alinea ini jelaskan apa yang dikehendaki atau diharapkan para pengantar kemerdekaan, ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini juga menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, momentum yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c. Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Alinea ini bukan saja menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi



Kegiatan Pembelajaran 3

juga menjadi keyakinan/kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeimbangan yaitu keseimbangan materiil dan spiritual, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu berkat ridho-Nya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

d. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” .

Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan negara Indonesia dirumuskan dengan “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan yang panjang dan padat sekaligus menegaskan (Tim Pendidikan Moral Pancasila, 1983:176) bahwa:

- 1) Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- 2) Negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat; Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Hakikat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran yaitu:

- a. Pokok pikiran yang pertama yang terkandung dalam “pembukaan” adalah “Negara” – begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(nilai keadilan, tanggung jawab, setia pada negara, tidak diskriminasi)
- b. Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pokok pikiran ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara juga

Kegiatan Pembelajaran 3

berkewajiban memajukan keajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini berkaitan erat dengan Pancasila sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(nilai cinta damai, daya juang, solidieritas)

- c. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- d. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Peserta membaca modul KP 3 secara mandiri.• Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis.	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Peserta melakukan curah pendapat tentang UUD 1945 sebagai Konstistusi Negara.• Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya.2. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada.3. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya.4. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju.5. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur.6. Peserta menyusun soal USBN, 3 soal pilihan ganda dan 3 soal subyektif berdasarkan LK.1.3.	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
	7. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 8. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 9. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur.	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 3 • Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. • Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
- 2) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 3) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 4) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 3.1 dan LK 3.2. secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul ini.

c. Kegiatan In -2

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai
- 2) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 3.1 dan LK 3.2. , sementara peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 3) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 4) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.



Kegiatan Pembelajaran 3

- 5) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 6) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

L K 3.1.

Di samping empat pokok pikiran dalam Pembukaan, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula tentang: “negara yang merdeka, berdaulat, dan anti penjajahan.

Jelaskan makna dari pernyataan tersebut!

L K 3.2.

AKTIVITAS PENGEMBANGAN BUTIR SOAL USBN

Prosedur:

1. Cermatilah kisi-kisi untuk penyusunan soal USBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam tabel 4.
2. Buatlah kisi-kisi soal UN/USBN pada lingkup materi yang dipelajari sesuai format di bawah ini!
3. Buatlah soal USBN pada lingkup materi yang dipelajari pada modul ini berdasarkan kisi-kisi yang telah Saudara kembangkan!
4. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTS berdasarkan acuan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran 8.
5. Buatlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 3 soal!
6. Buatlah soal uraian (Essay) sebanyak 3 soal!

Format Kisi-Kisi Soal

No. Urut	Kompetensi Dasar	Bahan Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1.		VII dan VIII	1. Sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan		PG dan Essay Level pengetahuan dan pemahaman
2.		VII dan VIII	2. Makna, Kedudukan, dan		PG dan Essay Level Aplikasi
3.		VII dan VIII	Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		PG dan Essay Level Penalaran

Format Kartu Soal

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas	:
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan pemahaman
Materi	:
Bentuk soal	: Pilihan Ganda/Essay
Soal	
Kunci Jawaban	

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D



Kegiatan Pembelajaran 3

1. Pernyataan berikut ini yang paling sesuai mengenai hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 adalah....
 - A. Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah teks proklamasi kemerdekaan
 - B. Pembukaan UUD 1945 adalah kristalisasi dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.
 - C. Proklamasi kemerdekaan menjadi landasan pembentukan pembukaan UUD 1945
 - D. Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar hukum berlakunya pembukaan UUD 1945

2. Pemerintah Indonesia mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan bangsa Palestina, maka hal tersebut sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat

3. Makna alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - A. dorongan yang kuat dari perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia diawali dengan sumpah pemuda dan diakhiri dengan Proklamasi kemerdekaan
 - B. dorongan yang untuk mencapai kemerdekaan yang luhur didasarkan atas perjuangan yang tidak kenal lelah dan bercita-cita terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
 - C. keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”
 - D. dorongan yang kuat perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan Keberhasilan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

4. Urgensi dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap....
 - A. Aturan Peralihan
 - B. Penjelasan UUD 1945
 - C. Pembukaan UUD 1945
 - D. Batang tubuh UUD 1945

5. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk alasan rasional, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun adalah
 - A. mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara Indonesia.
 - B. memuat tujuan Negara Republik Indonesia dan dasar Negara Pancasila.
 - C. menjadi acuan dan pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945.
 - D. Pembukaan merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945

F. Rangkuman

1. Sejak sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945 dibentuk panitia perumusan Rancangan UUD yang dikenal dengan Panitia Kecil terdiri dari 9 orang.. Pada sidang tsb dibahas mengenai bentuk negara dan disepakati bentuk Negara Republik. Bentuk negara Republik suatu bentuk negara dimana kepala negara adalah Presiden. Guna mematangkan Rancangan UUD menjadi UUD maka panitia kecil (panitia Sembilan) menyiapkan dan membahas secara sungguh, sehingga dihasil sebauah rancangan UUD.



Kegiatan Pembelajaran 3

2. Setelah berhasil menetapkan Rancangan UUD, selanjutnya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 telah membentuk suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang pertama menghasilkan (1) Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, (2) Menetapkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
4. Arti penting adalah bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang:
 - a. hak-hak asasi manusia;
 - b. hak dan kewajiban warga negara;
 - c. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 - d. wilayah negara dan pembagian daerah; kewarga-negara dan kependudukan; keuangan negara.
5. Contoh semangat Kebangsaan
 - a. Menunjukkan perilaku saling toleransi dalam kehidupan beragama
 - b. Memperlakukan martabat orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara.
 - c. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kerukunan, saling tolong menolong antar sesama pemeluk agama dan intern umat beragama.
 - d. Mengembangkan sikap dan perilaku bermusyawarah dalam memecahkan persoalan serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - e. Ikut peduli terhadap lingkungan sekitar demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum.
6. Undang-Undang Dasar mengandung pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis

7. Pokok pikiran tentang hakikat, sifat dan bentuk negara serta pemerintah negara Republik Indonesia telah dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila.
8. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 3, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?



Kegiatan Pembelajaran 3

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 4. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 3 dengan baik.



Kegiatan Pembelajaran 4

Bentuk dan Kedaulatan Negara serta Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat dapat:

1. Memahami bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
2. Memahami peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat.
2. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
3. Mendeskripsikan bentuk dan kedaulatan negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Menjelaskan lembaga-lembaga negara pemegang kedaulatan Negara RI
5. Menjelaskan peran lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

C. Uraian Materi

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Bunyi pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut membawa kosekuensi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

1. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA BERDASARKAN UUD NEGARA



RI TAHUN 1945

a. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu *daulat* dan *daulatan* yang artinya pergantian, peralihan, pergiliran atau peredaran (kekuasaan). Daulat berarti pergantian kekuasaan di bidang politik. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *sovereignty*, bahasa Perancis *souverainete*, dan bahasa Latin digunakan istilah *superanus*.

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik (Jimly Asshiddiqie, 2006:45).

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1539-1596). Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus. (Mas'ood: 2001)

Berdasarkan batasan di atas dapat dinyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara termasuk didalamnya menyejahterakan warga negaranya dan membuat undang-undang untuk mengatur warga negara. Dengan kedaulatannya pula, suatu negara memiliki organ-organ untuk melaksanakan pemerintahan dan keamanan.

Ciri-ciri kedaulatan

Kedaulatan memiliki ciri-ciri yang meliputi:

- 1) Kekuasaan yang bersifat terkuat (*superior*) dan tertinggi (*supreme*). Sifat kekuasaan inilah yang kemudian menjelma dalam negara yang bersifat memaksa sekaligus sebagai pembenar penggunaan senjata oleh angkatan bersenjata untuk menjaga, mempertahankan dan melindungi eksistensinya.
- 2) Pemegang kedaulatan berada dalam kedudukan memberikan perintah yang bersifat merdeka dan tidak tergantung kepada kekuasaan orang/badan lain
- 3) Mengandung kewenangan (*otoritas*) untuk mengambil keputusan terakhir/tertinggi. (Miriam Budiardjo: 2003)

Macam-macam Teori Kedaulatan

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang bersifat melekat pada negara, menurut pemikiran hukum dan politik dikenal lima teori atau ajaran, yaitu:

- 1) Kedaulatan Tuhan (*Sovereignty of the God*)

Kekuasaan tertinggi dalam negara bersumber dari Tuhan. Dalam praktiknya dilaksanakan oleh pemuka agama atau raja yang memerintah atas nama Tuhan atau titisan dewa. Negara yang menempatkan kedaulatan bersumber pada Tuhan disebut *teokrasi*. Kegiatan kenegaraan didasarkan atas nilai-nilai agama, yaitu *agama resmi negara*. Penganut teori ini percaya bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Penguasa negara (pemuka agama) dipercaya sebagai penjelmaan Tuhan. Karena itu, rakyat yang tinggal diwilayahNya harus patuh dan mengabdikan pada kehendak Tuhan sebagai pemilik negara.

- 2) Kedaulatan penguasa atau raja (*Sovereignty of the King*)

Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan penguasa atau raja secara turun-temurun. Agar negara kuat harus dipimpin oleh penguasa atau raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kebijakan raja tidak tunduk kepada konstitusi hukum moral, bahkan melanggar hak pribadi rakyat atau rakyat harus rela menyerahkan haknya kepada raja. Dalam menjalankan pemerintahan, raja hanya bertanggung-jawab pada dirinya sendiri dan Tuhan,



Kegiatan Pembelajaran 4

karena menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Negara yang menempatkan kedaulatan di tangan penguasa disebut negara kekuasaan.

3) Kedaulatan negara (*State Sovereignty*)

Kekuasaan tertinggi berada pada negara. Kekuasaan ini timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Negara ada karena kehendak Tuhan. Negara adalah kodrat alam yang berdiri menurut hukum alam dan hukum Tuhan. Adanya hukum dan konstitusi, karena diperlukan negara. Untuk itu, kebijakan negara tidak dapat dibatasi oleh hukum. Penguasa memerintah secara sewenang-wenang, totaliter atas nama negara. Rakyat wajib patuh dan setia kepada negara atau penguasa. Rakyat patuh pada hukum, bukan karena mereka berjanji untuk patuh, tetapi karena hukum adalah kehendak negara, buatan negara.

4) Kedaulatan hukum (*Sovereignty of Law*)

Kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada hukum yang bersumber dari rasa keadilan, kebenaran dan kesadaran hukum. Penguasa, rakyat, dan negara tunduk kepada hukum, karena kedudukan hukum di atas kekuasaan mana pun dalam negara. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berfungsi menurut ketentuan hukum. Negara yang menempatkan kedaulatan pada hukum disebut negara hukum (*Rechtsstaat atau Rule of Law*).

Menurut teori negara hukum murni/klasik bahwa pemerintah hanya menjadi penjaga malam - manfaat negara sebagai penjaga malam yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya untuk mengurus kepentingan bersama/umum. Berdasarkan teori hukum murni dinyatakan bahwa:

- a) Pemerintah dibatasi kekuasaannya sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara.
- b) Kekuasaan dibagi-bagi dan diserahkan kepada beberapa orang atau badan/lembaga kenegaraan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- c) Konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah. Pemerintahan diatur oleh hukum bukan oleh manusia (pejabat), (*government by laws, not by men*).

d) Gagasan negara sebagai penjaga malam pada abad 20 ditinggalkan dan berganti menjadi negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*Social Service State*). Negara/pemerintah turut bertanggung-jawab atas kesejahteraan rakyat, aktif menaikkan taraf kehidupan ekonomi dan sosial warga daulatannegaranya.

5) Kedaulatan rakyat (*People's Sovereignty*)

Kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat yang diberikan sebagian kepada pemerintah untuk mengatur kepentingannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah sebagai penguasa negara menjalankan kekuasaannya atas kehendak rakyat dan sebagai gantinya rakyat memperoleh jaminan kebebasan dan persamaan kedudukannya dalam pemerintahan. Negara yang menempatkan kedaulatan pada rakyat disebut negara demokrasi.

Menurut Jean Jacques Rousseau, kedaulatan ada di tangan rakyat dan selamanya tetap ada ditangan rakyat serta bersifat kerakyatan berdasarkan atas kemauan umum rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Kedaulatan rakyat bersifat:

- a) Kesatuan (*unite*) – *monistis* artinya semangat dan kemauan umum rakyat adalah suatu kesatuan yang berhak memerintah dan menolak perintah .
- b) Bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*) berarti penguasa adalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
- c) Tak dapat dialihkan (*inalienabilite*) artinya kedaulatan tak mungkin dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.
- d) Tak dapat berubah (*imprescriptibilite*) berarti kedaulatan milik setiap bangsa secara turun-temurun.

b. Makna Kedaulatan Rakyat berdasar UUD Negara RI Tahun 1945

Kedaulatan bermakna sebagai pengatur kegiatan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak rakyat secara kesatuan (*unite*) dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah sebagai penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya sesuai kehendak rakyat agar memperoleh dukungan atau kepercayaan dari rakyat. Untuk itu pemerintah dalam menetapkan berbagai



Kegiatan Pembelajaran 4

kebijakan yang akan dilaksanakan hendaknya terbuka, sehingga rakyat dapat mengontrol mulai proses sampai pelaksanaannya. Pemerintah yang tanpa dukungan rakyat akan menjadikan semua program menyimpang dalam pelaksanaannya atau mengalami kegagalan dalam mengemban amanat rakyat.

Disamping itu, kedaulatan bermakna untuk mengatasi permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang disepakati bersama dengan memperhatikan hak-hak rakyat secara kesatuan.

Kebermaknaan kedaulatan rakyat tersebut menunjukkan berfungsinya pemerintah/ negara dalam melindungi seluruh rakyat/bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (fungsi pertahanan dan keamanan), memajukan kesejahteraan umum/seluruh rakyat (fungsi ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa/seluruh rakyat (fungsi sosial budaya), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (politik).

Kemaknaan kedaulatan tersebut merupakan penggabungan dari teori kedaulatan Tuhan, hukum dan rakyat secara simultan. Kesadaran kolektif kita (bangsa) tentang kemahakuasaan Tuhan YME diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan rakyat yang diterima sebagai dasar berpikir sistemik dalam konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam gagasan *rechtsstat* atau *the rule of law* dan prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum sebagai pegangan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena itu dalam penyusunannya melalui mekanisme demokrasi sesuai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (prinsip kedaulatan rakyat), demokrasi perwakilan dan prinsip Ketuhanan YME.

c. Bentuk dan Kedaulatan Negara Sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945

Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun

pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaannya berlandaskan Pancasila (khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan) dan landasan konstitusional UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu dapat juga diartikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatannya, rakyat terlibat secara langsung dalam kegiatan kenegaraan, diantaranya adalah:

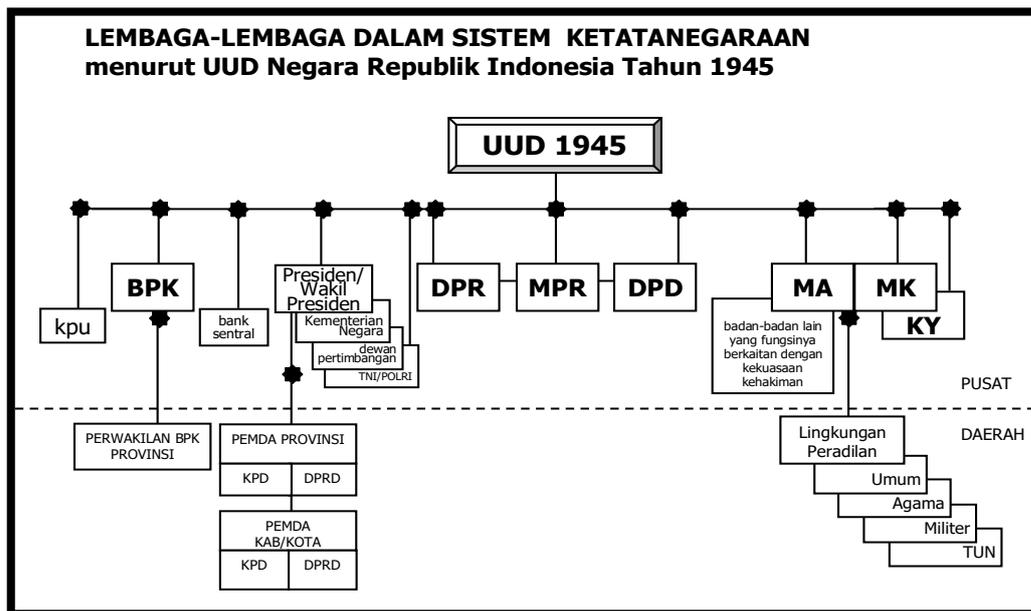
- 1) mengisi keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 ayat 1).
- 2) mengisi keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 ayat 1).
- 3) mengisi keanggotaan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 22 C ayat 1).
- 4) memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6 A ayat 1).
- 5) memilih para kepala daerah secara demokratis (pasal 18)

2. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN RAKYAT

Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

Dalam modul ini, lembaga negara yang akan di bahas adalah lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 secara rinci (antara lain mencakup kedudukan, kewenangan, keanggotaan) yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga negara ini merupakan organ konstitusi yang diberikan kewenangan cukup besar oleh konstitusi sehingga mempunyai peranan besar pula dalam penyelenggaraan negara (Patrialis Akbar, 2013:34).

Adapun tugas dan wewenang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Bagan Lembaga-lembaga Negara

a) Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem presidensial ini tidak dibedakan adanya kepala negara dan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR/DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan karena itu bertanggung-jawab kepada presiden, bukan dan tidak bertanggung-jawab kepada DPR/MPR.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (1) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10); (2) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1 UUDNegara RI Tahun 1945) ; (3) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (4)

- mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (1) membentuk Undang-Undang; (2) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (3) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang (pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945).
 - 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *privilege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - b) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - c) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945); serta,
 - d) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)

b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keempat kegiatan itu tidak bersifat rutin. Yang bersifat rutin, yaitu setiap lima tahun



Kegiatan Pembelajaran 4

sekali hanyalah sidang majelis yang diadakan untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)
- 2) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:
 - ✓ Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - ✓ Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat 3, menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 3) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.
- 4) fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
 - ✓ Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945);

- ✓ Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945); dan
- ✓ Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945)

d) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) hasil amandemen dinyatakan:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan



Kegiatan Pembelajaran 4

dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan DPD bersifat terbatas. Dalam kaitannya dengan fungsi legislatif, DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sesungguhnya. Beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. DPD bekerja hanya sebagai penunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali (Jimly Asshiddiqie, 2012: 188).

Di bidang pengawasan, DPD mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, akan tetapi hasil pengawasan tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa DPD menjadi *subordinat* DPR. Oleh karenanya muncul pendapat di tengah masyarakat bahwasannya DPD adalah bagian dari atau menjadi salah satu bagian komisi di DPR.

Di bidang *budgeting*, kewenangan DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN. Hal ini kurang dapat diterima karena sesungguhnya secara filosofi DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah, dalam hal ini adalah provinsi. DPD seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan APBN, karena kalau kita melihat struktur

APBN yang dominan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berhubungan dengan kepentingan daerah propinsi/ kabupaten/ kota. Idealnya DPD sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah diajak duduk bersama dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan APBN.

e) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIII A, tiga pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

f) Mahkamah Agung (MA)

MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim



Kegiatan Pembelajaran 4

Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

g) Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B).

h) Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;

- d) memutuskan sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta membaca modul KP 4 secara mandiri. • Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis. 	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta melakukan curah pendapat tentang makna kedaulatan rakyat • Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mengelompok menjadi 3 kelompok (atau sesuai kebutuhan) 2. Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya. 	

Kegiatan Pembelajaran 4

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada. 4. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. 5. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 6. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur. 7. Peserta menyusun soal USBN, 3 soal pilihan ganda dan 3 soal subyektif berdasarkan LK.4.2. 8. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 9. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 10. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 4 • Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. • Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
- 2) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 3) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 4) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 4.1 dan LK 4.2. secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul ini.

c. Kegiatan In -2

- 1) Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai
- 2) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 4.1. dan LK 4.2 dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 3) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 4) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 5) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 6) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 4.1.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik.

“Untuk melaksanakan kedaulatannya, seorang warga negara berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilu.

Jelaskan makna pernyataan di atas!

L K 4.2.**AKTIVITAS PENGEMBANGAN BUTIR SOAL USBN :****Prosedur:**

1. Cermatilah kisi-kisi untuk penyusunan soal USBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam tabel 4.
2. Buatlah kisi-kisi soal UN/USBN pada lingkup materi yang dipelajari sesuai format di bawah ini!
3. Buatlah soal USBN pada lingkup materi yang dipelajari pada modul ini berdasarkan kisi-kisi yang telah Saudara kembangkan!
4. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTS berdasarkan acuan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran 8.

Kegiatan Pembelajaran 4

5. Buatlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 3 soal!
6. Buatlah soal uraian (Essay) sebanyak 3 soal!

Format Kisi-Kisi Soal

No	Kompetensi Dasar	Bahan Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1		IX	Bentuk dan Kedaulatan negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		PG dan Essay Level Pengetahuan dan Pemahaman
2		IX	Bentuk dan Kedaulatan negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		PG dan Essay Level Aplikasi
3		IX	Bentuk dan Kedaulatan negara sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		PG dan Essay Level Penalaran

Format Kisi-Kisi Soal

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	:
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan Pemahaman
Materi	:
Bentuk Soal	: Pilihan Ganda/ uraian
Soal	
Kunci Jawaban	

E. Latihan /Kasus/Tugas

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Bentuk dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen adalah
 - A. negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di DPR
 - B. negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan MPR
 - C. negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat
 - D. negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan Presiden

2. Untuk mewujudkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan melalui sebuah peraturan, yaitu ...
 - A. PERPU.
 - B. Keputusan DPR.
 - C. Undang Undang.
 - D. Peraturan Pemerintah.

3. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR juga mempunyai beberapa hak. Salah satunya adalah hak angket. Hak tersebut penting digunakan dalam rangka
 - A. terciptanya stabilitas pemerintahan
 - B. pembuatan UU yang sesuai kehendak rakyat
 - C. pengawasan terhadap APBN agar lebih transparan
 - D. melaksanakan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap pemerintahan

4. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengurangi tugas dan wewenang MPR, diantaranya adalah
 - A. mengubah Undang-Undang Dasar
 - B. menetapkan Undang-Undang Dasar
 - C. memilih Presiden dan Wakil Presiden
 - D. melantik Presiden dan Wakil Presiden



Kegiatan Pembelajaran 4

5. Banyak penolakan saat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 disahkan DPR. Antara lain berupa petisi di dunia maya, desakan penerbitan Perppu, ataupun usulan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengambil sikap untuk tidak menandatangani Undang-Undang tersebut. Dengan kondisi demikian, maka Undang-Undang tersebut
- A. tidak sah dan tetapi dapat diajukan kembali
 - B. tidak sah dan harus dilakukan pembahasan ulang
 - C. tetap sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib diundangkan
 - D. tetap sah dengan beberapa perbaikan terhadap pasal yang krusial

F. Rangkuman

Setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”*. Kedaulatan rakyat maksudnya kekuasaan ada di tangan rakyat, karena itu lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
2. Kedudukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MK, MA, BPK, KY, DPD memiliki kedudukan yang sama. Artinya tidak ada perbedaan kedudukan, semua lembaga negara sebagai lembaga tinggi negara. Fungsi dan kewenangan lembaga negara berbeda satu dengan lembaga negara lainnya, silahkan membaca di dalam modul di atas.
3. Hubungan antar lembaga negara seperti Presiden dengan DPR, memiliki hubungan erat. Contoh hubungan di bidang legislatif bahwa setiap usulan RUU harus di bahas bersama antara Presiden dengan DPR.. Hubungan di bidang anggaran, setiap anggaran negara harus dibahas bersama antara Presiden dengan DPR, dsb. Selanjutnya silahkan menuliskan hubungan antar lembaga negara untuk dilaporkan ke instruktur.
4. Sikap positif terhadap lembaga negara adalah sikap untuk mematuhi segala keputusan yang dihasilkan oleh lembaga negara seperti mentaati aturan, memenuhi kewajiban terhadap negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan persatuan dan kesatuan, dsb.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 4, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 4.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$



Kegiatan Pembelajaran 4

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 5. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 4 dengan baik



Kegiatan Pembelajaran 5

Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika

A. Tujuan

1. Menjelaskan keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
2. Menjelaskan arti penting keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
3. Menjelaskan keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.
4. Memahami konsep dasar dan makna Bhinneka Tunggal Ika
5. Memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menyebutkan beberapa suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan makna dan arti penting keberagaman suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman masyarakat Indonesia.
4. Peserta diklat dapat menjelaskan Konsep Dasar dan Makna Bhinneka Tunggal Ika
5. Peserta diklat dapat menjelaskan arti pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka kebhinnekaan.
6. Peserta diklat mampu memberikan contoh sikap perilaku persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Peserta diklat dapat mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika



C. Uraian Materi

Makna dan Arti Penting Keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau “cultural diversity” yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastis bangsa

Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

Faktor Penyebab Keberagaman dalam Masyarakat di Indonesia

- 1) Letak Strategis Wilayah Indonesia di Persimpangan Jalan Dunia
- 2) Kondisi Negara Kepulauan
- 3) Perbedaan Kondisi Alam
- 4) Keadaan Transportasi dan Komunikasi
- 5) Sikap Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan
- 6) Latar Belakang Sejarah

Perilaku Toleran terhadap Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam.

Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar membiarkan orang lain yang berbeda, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, menghormati dan menghargai secara ikhlas terhadap perbedaan keyakinan, agama, suku, ras, budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin.

1) Toleransi dalam Kehidupan Beragama

Semua orang di Indonesia tentu menyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Bunyi

Kegiatan Pembelajaran 5

lengkap Pasal 29 ayat (2) adalah “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama apapun tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan atau agamanya kepada orang lain. Bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan beragama di antaranya adalah:

- menghormati agama yang diyakini oleh orang lain;
- tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama;
- menghormati dan menghargai keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda;
- tidak memandang rendah agama yang berbeda yang dianut oleh orang lain.

2) Toleransi terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bukanlah menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Sikap dan perilaku toleransi akan mendorong terwujudnya semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Melalui toleransi akan dapat diwujudkan sikap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Perbedaan suku dan ras bukanlah ukuran baik dan buruknya seseorang. Baik dan buruk seseorang tidak ditentukan oleh warna, rupa, dan bentuk fisik, melainkan oleh baik dan buruknya berperilaku. Karenanya, harus dikembangkan perilaku yang baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku dan ras. Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras diantaranya adalah dengan menghormati semua suku dan ras yang ada serta tidak memandang rendah terhadap orang lain yang berbeda suku dan ras.

3) Toleransi terhadap Keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dijaga. Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia diantaranya adalah:

- mengenal dan memahami kebudayaan suku atau masyarakat lain yang berbeda dengan kebudayaan sendiri;

- menghormati dan menghargai kebudayaan yang dimiliki suku lain;
- tidak memaksakan kebudayaan kita kepada orang yang berbeda suku dan budaya;
- tidak memandang rendah kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh suku lain.

4) Kesadaran Gender

Pemahaman gender di Indonesia tentulah akan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran gender bersifat dinamis dan dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Misalnya dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Anak laki-laki atau anak perempuan, keduanya bisa menjaga kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Di sekolah, laki-laki atau perempuan sama-sama dapat menjadi guru. Dalam kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi alasan perbedaan sikap dan perilaku yang semata-mata hanya didasarkan atas perbedaan jenis kelamin.

Pengertian dan Makna *Bhinneka Tunggal Ika*

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Jika diterjemahkan per patah kata, kata ***bhinneka*** berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata ***neka*** dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata ***tunggal*** berarti "satu". Kata ***ika*** berarti "itu". Seloka atau kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat HinduSiwa dengan umat Buddha (Farisi, 2014).



Kegiatan Pembelajaran 5

Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam konteks Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Indonesia adalah bersifat pluralis-multikultural dalam suku bangsa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ras/Etnis dan kebudayaan yang beraneka ragam. Konsep ini harus dimaknai sekalipun masyarakat Indonesia memiliki sifatnya yang majemuk, akan tetapi senantiasa memiliki semangat yang satu (persatuan). Kemajemukan bukanlah sebuah penyebab keretakan hubungan, akan tetapi, dengan kemajemukan itu masyarakat Indonesia justru memiliki kekayaan sosial (baca: modal sosial) sebagai aset bangsa dalam membangun kesatuan bangsa yang kokoh.

Arti Penting Persatuan dan Kesatuan

Secara etimologis (asal kata kebahasaan) kata "persatuan" berasal dari kata "satu" artinya utuh, sesuatu yang tidak terpisah. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan sila ke-3 dalam Pancasila. Sudah kita ketahui pula bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dimana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras di dalamnya. Semua perbedaan tersebut hanya bisa bergabung menggunakan Persatuan.

Persatuan sendiri pengertiannya adalah mengabung menjadi satu dan mutlak tidak dapat dipisahkan. Contoh, banyak sekali pulau di Indonesia, apabila berpecah atau memisah membentuk negara baru akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi di Indonesia, konflik pun akan terjadi antara kelompok pro dan kontra. Maka sangatlah dibutuhkan persatuan di Indonesia agar hal tersebut tidak terjadi.

Makna “ Persatuan Indonesia “dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah serta satu kesatuan asas kerokhanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Persatuan adalah hal yang terbentuk tidak secara instan begitu saja, melainkan dengan proses yang panjang.

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa negara Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Semua perbedaan tersebut harus memiliki wadah untuk bergabung menjadi satu yaitu persatuan. Maka dari itu sangatlah penting sebuah persatuan di dalam Negara agar terwujud kesatuan dan persamaan. Negara Indonesia sendiri sangatlah besar dan luas sehingga sangatlah sulit untuk mengaturnya apabila tidak ada persatuan.

Persatuan sangatlah penting bagi sebuah negara yang ingin hidup sejahtera. Dengan persatuan pula sebuah negara bahkan bisa bersatu dengan negara lain. Persatuan juga akan mewujudkan kerjasama yang baik diantara orang di dalamnya. Marilah kita ingat bersama semboyan negara kita “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang mengandung arti meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu.

Seluruh warga Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mengembangkan, persatuan bangsa dan bernegarasesuai dengan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa kiranya sangat penting komitmen terhadap semangat persatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bersemboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Kehidupan

Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu "memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-BHINNEKA TUNGGAL IKA". Wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tersebut adalah sebagai :

1. Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan
2. Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi



Kegiatan Pembelajaran 5

3. Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan
4. Menjauhi pertentangan dan perkelahian
5. Menggalang Persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan

Semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang di samping sebagai makhluk individu (pribadi) juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Sebagai makhluk pribadi setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain. Walaupun demikian, manusia selalu mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain, karena dia adalah makhluk sosial. Demikian bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah sebuah keluarga besar, yang berdiam di dalam rumah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang masyarakat bercorak *Bhinneka Tunggal Ika*. Mereka selalu bergaul dan bekerja sama serta saling bantu-membantu antara sesamanya. Sebagai keluarga besar, bangsa Indonesia harus bahu-membahu yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong yang selalu dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Semangat kekeluargaan dan Gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Sikap ini telah lama berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

Gotong royong, berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang-perorang. Segala tugas akan lebih ringan kalau kita kerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu.

Praktik semangat kekeluargaan dan gotong dapat kita temukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat. Misalnya, di lingkungan keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Desa, di Sekolah bahkan masyarakat bangsa dan Negara. Di samping itu, semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan juga kita kembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, keamanan, pertanian dan sebagainya. Begitu kuatnya sifat kegotong-royongan yang membudaya di kalangan masyarakat kita. Bahkan di beberapa daerah telah

terbentuk lembaga-lembaga kegotong royongan, seperti misalnya “*Sambatan*”, “*Njurung*”, “*Sinoman*”, “*Saya*” di Jawa; “*Subak*” di Bali, “*Mapalus*” di Sulawesi Utara, dan kita yakin masih banyak lagi yang lain.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur gotong royong yang dimaksud, antara lain adalah: (1) adanya sikap kerja sama yang tinggi; (2) menjunjung tinggi sikap kekeluargaan; (3) sikap hormat-menghormati teman kerja; (4) mengutamakan kerja keras; (5) mengutamakan kepentingan bersama; (6) kepentingan diri sendiri menjadi nomor dua.

Permasalahan yang timbul dalam keberagaman masyarakat yang Beragam.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki beberapa implikasi positif dan negatif. Masyarakat Indonesia yang bercorak *Bhinneka Tunggal Ika* itu, pada dasarnya merupakan potensi kekayaan bangsa yang menjadi energi kemajemukan dan demokrasi, namun di balik itu juga sangat rentan dengan konflik.

Kita harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat majemuk dalam suku bangsa dan budaya. Keberagaman suku bangsa dan budaya itu akan berdampak negatif, berupa timbulnya pertentangan antar budaya, jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai oleh konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua (Irian Jaya), dan daerah-daerah lainnya.

Pada era reformasi sekarang ini, dampak negatif akibat keberagaman social budaya, antara lain sebagai berikut : (a) Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sulit diatasi , menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta rendahnya daya beli masyarakat; (b) Menimbulkan konflik antar elite dan golongan politik, sehingga menghambat jalannya roda pemerintah dan pelaksanaan pembangunan; (c) Menimbulkan konflik antar suku bangsa, antar golongan, atau antar kelas sosial. (d) Menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup,



Kegiatan Pembelajaran 5

perubahan sistem dan struktur pemerintahan, dan sebagainya.

Kondisi itu, menandakan bahwa masing-masing komponen keberagaman masyarakat/daerah secara ideasional dan fisik, memiliki karakteristik yang berbeda yang sulit untuk berintegrasi. Masing-masing aktor keberagaman dan pendukung kebudayaan daerah (baca: suku-suku bangsa) saling berupaya agar kebudayaan yang dihasilkan mampu bertahan sebagaimana kebudayaan-kebudayaan daerah yang lain. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat terkadang justru berbeda dengan nilai-nilai budaya yang telah disepakati oleh masyarakat di tempat dan lingkungan geografis lain. Belum lagi jika dikaitkan dengan pepatah Jawa: “*desa mawa cara*” dan “*kutha mawa tata*” (desa dan kota memiliki cara dan aturan sendiri-sendiri), “*lain lubuk, lain ikannya*” (Al-Hakim, 2015). Kondisi demikian bisa jadi akan berpengaruh terhadap cara pandang mereka, ketika pola pikir lokal ditempatkan dalam kerangka pikir kehidupan berbangsa dan bernegara (nasional).

Kenyataan tersebut relevan dengan temuan Berghe (dalam Nasikun, 1993, Al-Hakim, 2015), yang menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk memiliki karakteristik: (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok dengan kelompok lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coersion*) dan saling ketergantungan; dan (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain.

Karakteristik tersebut sekaligus, akan berimplikasi munculnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama, yakni munculnya permasalahan etnosentrisme, pikiran disintegarsi bangsa, konflik horisontal dan vertikal, kesenjangan sosial, kaya-miskin, lemahnya nasionalisme, sekularisme, anarkhisme dan sebagainya.

Implikasi lain, penanganan keragaman masyarakat juga memiliki konsekuensi politis. Ketika persoalan keberagaman dipandang penting sebagai agenda berbangsa dan bernegara dengan demikian seringkali persoalan keberagaman

dimasukkan dalam konteks kehidupan berbangsa, berakibat penanganan masalah keanekaragaman berubah menjadi argumen politik pemerintah.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta membaca modul KP 5 secara mandiri. • Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis. 	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta. • Peserta menyanyikan lagu “Dari Sabang sampai Merauke” • Peserta melakukan curah pendapat tentang Keberagaman Masyarakat Indonesia • Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mengelompok menjadi 3 kelompok (atau sesuai kebutuhan) 2. Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya. 3. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada. 4. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. 5. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 6. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur. 7. Peserta menyusun soal USBN, 3 soal pilihan ganda dan 3 soal subyektif berdasarkan LK.5.2. 8. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 9. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 10. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 	

Kegiatan Pembelajaran 5

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 5 Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Peserta bersama-sama menyanyikan lagu nasional “Dari Sabang sampai Merauke”
- 2) membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 3) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 4) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 5.1. dan LK 5.2., secara individu sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 5.1. dan LK 5.2. dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 6.1.

Kelompok 1	:	Jelaskan dengan singkat makna atau arti penting serta dampak positif dan negatif dari keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam
------------	---	--

		masyarakat Indonesia.
Kelompok 2	:	Jelaskan cara-cara menghargai keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Kelompok 3	:	<i>“Ada yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hanya sebatas retorika belaka. Nyatanya bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang selalu suka konflik dengan orang lain. Coba bayangkan, pada jaman kerajaan di Indonesia dulu, kerajaan yang satu bangsa selalu berperang dengan kerajaan lain”</i> . Bagaimanakah respon kelompok Anda terhadap Pernyataan tersebut?

LK 6.2.

AKTIVITAS PENGEMBANGAN BUTIR SOAL USBN

Prosedur:

1. Cermatilah kisi-kisi untuk penyusunan soal USBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam tabel 4.
2. Buatlah kisi-kisi soal UN/USBN pada lingkup materi yang dipelajari sesuai format di bawah ini!
3. Buatlah soal USBN pada lingkup materi yang dipelajari pada modul ini berdasarkan kisi-kisi yang telah Saudara kembangkan!
4. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTS berdasarkan acuan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran 8.
5. Buatlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 3 soal!
6. Buatlah soal uraian (Essay) sebanyak 3 soal!

Format Kisi-Kisi Soal

No	Kompetensi Dasar	Bahan Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1		VII	Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka		PG dan Essay Level Pengetahuan dan Pemahaman
2		VII	Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka		PG dan Essay Level Aplikasi

Kegiatan Pembelajaran 5

3		VII	Tunggal Ika		PG dan Essay Level Penalaran
---	--	-----	-------------	--	---------------------------------

Format Kartu Soal

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas	: VII
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan pemahaman
Materi	:
Bentuk soal	: Pilihan Ganda/Essay
Soal	
Kunci Jawaban	

E. Latihan Kerja/Tugas/Kasus

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terwujud bila dapat dikembangkan pola pikir
 - A. Bhinneka Tunggal Ika
 - B. kehidupan kebangsaan yang bebas
 - C. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - D. dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia
2. Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah merupakan...

- 
- A. milik bersama seluruh bangsa Indonesia
 - B. milik bersama Pemerintah Pusat dan Daerah
 - C. milik masing-masing daerah yang bersangkutan
 - D. milik masing-masing daerah dan daerah sekitarnya
3. Warganegara Indonesia memiliki potensi/kekuatan untuk mampu menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara apabila....
- A. memiliki sikap tenggang rasa
 - B. meningkatkan kerjasama di dalam masyarakat
 - C. melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik
 - D. memiliki sikap saling menghormati dan menyayangi
4. Keberagaman sosial-budaya merupakan modal dasar dan motivasi untuk
- A. membentuk masyarakat madani
 - B. menciptakan kerukunan dalam membangun NKRI
 - C. melakukan aktivitas sehari-hari demi kemakmuran bersama
 - D. mewujudkan pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata
5. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna
- A. berbeda dalam persatuan
 - B. bersatu tanpa perbedaan
 - C. berbeda untuk persatuan
 - D. bersatu karena perbedaan

F. Rangkuman

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.





Kegiatan Pembelajaran 5

3. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
4. Menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
5. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan kehidupan bernegara.
6. Masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, antara lain adalah: (1) berupa timbulnya pertentangan antar budaya, jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai oleh konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua (Irian Jaya), dan daerah-daerah lainnya; (2) Kecemburuan sosial, misalnya Peristiwa Tasikmalaya merupakan contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen; Konflik sosial, misalnya Peristiwa Sambas merupakan contoh konflik dan yang disebabkan oleh perbedaan etnis / suku bangsa antara suku Dayak (penduduk asli) dengan suku Madura (penduduk pendatang). Peristiwa Aceh dan Papua (Irian Jaya) merupakan contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah Pusat dengan masyarakat daerah setempat; (3) *Sentimet* kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibukota Jakarta antara suku bangsa Betawi (penduduk asli) dengan suku bangsa Madura (penduduk pendatang); (4) Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota Negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial, seperti peristiwa Tanjung Priuk.
7. Faktor penyebab masalah keberagaman antara lain adalah: yaitu faktor kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Dalam ranah kebijakan, bagaimanakah agar urusan keberagaman tidak mudah terseret dalam kawasan politik-perpolitikan dan

hanya mengarah pada argumen politik pemerintah? Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah (negara) harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang keberagaman, yang tidak menguntungkan negara saja, tetapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk tadi. Sementara itu, dalam kaitannya faktor penyebab intern dalam komponen keberagaman disebabkan oleh banyak arogansi yang berasal dari unsur keberagaman, misalnya kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, ras/etnis paling benar sendiri. Belum lagi dalam soal kebudayaan banyak antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendiri yang paling baik. Kondisi demikian akan menyebabkan iklim disharmoni sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak *Bhinneka Tunggal Ika*.

8. Sikap Mental yang Mengancam Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman, antara lain adalah: (a) Etnosentrisme; (b) Sikap Primordial (kedaerahan); (c) Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah; dan (d) Fanatisme sempit (berlebihan).
9. Alternatif Penyelesaian Masalah Keberagaman Masyarakat, dapat dipecahkan dengan metode-metode, antara lain sebagai berikut: (a) *Metode kompetisi (competition)*; (b) *Metode menghindari (avoidance)*; (c) *Metode akomodasi (accommodation)*; (d) *Metode kompromi (compromise)*; (e) *Metode kolaborasi (collaboration)*; dan *Metode pengurangan konflik*.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 6, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?



Kegiatan Pembelajaran 5

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 6.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 6. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 5 dengan baik.

Kegiatan Pembelajaran 6

Harmoni Keutuhan Wilayah dan Kehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Tujuan

Peserta diklat mampu menjelaskan Harmonisasi Keutuhan Wilayah dan Kehidupan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjelaskan makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menjelaskan Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Menjelaskan pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Menganalisis peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan
7. Memiliki sikap dan perilaku komitmen untuk mempertahankan keutuhan NKRI

C. Uraian Materi

Sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu, maka golongan pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jln. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan juru bicara Sutan Syahrir, para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memperklamasikan kemerdekaan saat itu juga, lepas dari campur tangan Jepang. Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda karena Proklamasi Kemerdekaan itu perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI, sebab badan inilah yang ditugasi untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menolak pendapat



Kegiatan Pembelajaran 6

Bung Karno sebab PPKI itu buatan Jepang, menyatakan kemerdekaan lewat PPKI tentu Akan dicap oleh Sekutu bahwa kemerdekaan itu hanyalah pemberian Jepang, para pemuda tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Bung Karno berpendapat lain, bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah. Masalah yang lebih penting adalah menghadapi sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, atas dasar itulah Bung Karno menolak usul para pemuda. Akibat perbedaan pendapat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00 dini hari, Ir. Sukarno dan Drs Moh Hatta dibawa ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Krawang Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengamankan kedua tokoh pimpinan tersebut agar tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang, inilah yang dimaksud dengan peristiwa Rengasdengklok. Keberangkatan Sukarno Hatta ke Rengasdengklok dikawal oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syodanco Singgih. Rengasdengklok dipilih karena dianggap aman dan daerah tersebut telah dikuasai oleh tentara PETA dibawah pimpinan Codanco Subeno. Sementara itu di Jakarta terjadi perundingan antara para pemuda dengan Mr. Ahmad Subardjo selaku wakil golongan tua yang menjabat sebagai penasehat dalam tubuh PPKI. Dalam perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Pada sore harinya, tanggal 16 Agustus 1945 Mr. Ahmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan mendesak para pemuda agar membawa kembali Sukarno Hatta ke Jakarta. Setelah ada jaminan dari Mr. Ahmad Subardjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat lambatnya jam 12, maka para pemuda bersedia membawa kembali kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta.

Perumusan Teks Proklamasi.

Setelah sampai di Jakarta, malam itu juga Sukarno Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan golongan pemuda. Mereka berkumpul di Jln. Imam Bonjol no.1, dirumah Laksamana Muda Maeda, kepala perwakilan angkatan laut Jepang di Jakarta. Dalam pertemuan di rumah Maeda, disepakati agar Sukarno Hatta menemui Mayjen Nisyimura yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Umum

Angkatan Darat Jepang untuk menjajagi sikap resmi Jepang terhadap rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nisyimura tetap memegang teguh tugasnya menjaga status Quo di Indonesia, dengan pengertian bahwa tidak boleh ada perubahan apapun di Indonesia sampai pasukan sekutu datang, dan Jepang hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu. Akhirnya Sukarno Hatta kembali kerumah Maeda dan mengadakan pertemuan dengan hasil keputusan Proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan Jepang. Melalui berbagai pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia, diputuskan hal sebagai berikut : diputuskan untuk segera merumuskan teks/naskah proklamasi, adapun yang merumuskan adalah Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo, setelah naskah selesai dirumuskan dan disetujui isinya, terjadilah perdebatan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi, yang akhirnya atas usul pemuda Sukarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Pelaksanaan Proklamasi Dan Penyebarluasannya.

Semula Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di lapangan Ikada (sekarang Monas), dengan maksud agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, akan tetapi Ir. Sukarno tidak sependapat, karena pembacaan ditempat tsb akan mengundang bentrokan antara rakyat dengan pemerintah militer Jepang, dengan alasan tsb, maka disepakati proklamasi akan dilaksanakan di kediaman Ir. Sukarno dan dibacakan oleh Sukarno Hatta.

Soekarno ketika membaca naskah proklamasi didampingi Moh. Hatta di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta (Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka). Tepat hari jumat jam 10.00 WIB, naskah proklamasi dibacakan, ini merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sesudah naskah proklamasi selesai dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka merah putih oleh Pemuda Suhud dan eks sudanco Latif Hendraningrat dengan disaksikan segenap yang hadir, upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam suasana yang sangat sederhana itu telah sampailah bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaannya. Satu persatu hadirin meninggalkan tempat dengan tenang dan dengan tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan. Meskipun hanya berlangsung singkat, namun



Kegiatan Pembelajaran 6

peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu

1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.
2. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.
3. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyusun alat kelengkapan Negara. Usaha menyusun alat kelengkapan Negara antara lain dilakukan melalui :

- a. Sidang PPKI yang I, tanggal 18 Agustus 1945, keesokan harinya setelah proklamasi dengan keputusan: 1) Mengesahkan UUD 194, 2) Memilih presiden dan wakil presiden 3) Untuk sementara waktu tugas presiden akan dibantu oleh Komite Nasional
- b. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 ,dengan keputusan :
 - 1) menetapkan 12 kementerian.
 - 2) membagi wilayah RI menjadi 8 propinsi yang dikepalai oleh Gubernur
- c. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, dengan keputusan
 - 1) membentuk Komite Nasional Indonesia yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo.
 - 2) Membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ditetapkan sebagai satu satunya partai di Indonesia, namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan yang menghendaki agar masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, hal ini mendorong keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 No. X yang berisi tentang pembentukan partai partai politik

- 3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang beranggotakan para pemuda bekas HEIHO, PETA dan KNIL, dan anggota anggota badan semi militer lainnya.

Pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara keamanan Rakyat (TKR), sebagai panglimanya diangkat Supriyadi, namun karena tidak pernah muncul, maka posisinya digantikan oleh Sudirman, sedangkan sebagai kepala staf umum diangkatlah Oerip Sumoharjo. Nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan maklumat pemerintah 26 Januari 1946, dan pada tanggal 7 Juni 1947 nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dihancurkan dengan bom atom. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu anggota Sekutu dalam Perang Dunia II, pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London.

Sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) atas wilayah Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itu, para pemuda yang telah mendengar berita kekalahan pasukan Jepang segera mendesak Soekarno – Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan itu ditolak sehingga muncul Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945).

Para menculik Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guruh Soekarnoputra, dan Moh. Hatta. Mereka dibawa oleh pemuda ke Rengasdengklok. Penculikan tersebut beretujuan untuk menjauhkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu pemuda mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok berakhir setelah Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Hal itu terjadi apabila Soekarno – Hatta dikembalikan ke Jakarta hari itu juga.



Kegiatan Pembelajaran 6

Ir. Soekarno dan rombongan setelah sampai di Jakarta segera menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dijadikan tempat penyusunan Proklamsai Kemerdekaan. Di rumah tersebut hadir beberapa tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo. Tokoh-tokoh tersebut yang merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan. Turut serta Soekarni, B.M. Diah, Soediro, dan Chairul Saleh. Satjuti Melik mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah teks Proklamasi berhasil disusun semua tokoh kembali ke rumah masing-masing. Sebagaimana tokoh menyebarkan berita akan diadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya dilaksanakan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan). Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB acara dimulai. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta tampil di depan mikropon untuk berpidato sejenak dan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak detik itu dengan adanya proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaannya.

Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang telah kamu pelajari diatas. Dan faktor yang menentukan pembentukan NKRI antara lain sebagai berikut. 1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan 2. Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia. 3. Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing. 4. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan faktor-faktor di atas bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut

kemerdekaan menjajah bangsa lain. 2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

- a. Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain
- b. telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negaranegara lain yang telah ada sebelumnya
- c. tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negaranegara lain di dunia
- d. puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah

Maksud dan tujuan proklamasi:

- a. melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain
- b. bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain
- c. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupannya
- d. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasannya
- e. dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya
- f. mencapai tujuan nasional bangsa.

Arti Proklamasi

Kepada dunia Luar:

- a. sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka
- b. bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat,
- c. wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional.

Bagi Bangsa Indonesia:



Kegiatan Pembelajaran 6

- a. untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia,
- b. mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia
- c. sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan
- d. bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri Negara baru, yaitu Negara Indonesia.
- e. dengan berdirinya negara baru ini maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut
- f. norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia
- g. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (Logemann).

Sikap dan perilaku komitmen mempertahankan keutuhan NKRI

Tidak bisa dipungkiri, penegakan hukum yang lebih, keadilan yang tidak berkeadilan, kesenjangan sosial ekonomi yang makin lebar, dapat menimbulkan perpecahan NKRI. Karena itu diperlukan sikap perilaku komitmen mempertahankan NKRI bagi seluruh warga negara Indonesia antara lain.

1. supremasi hukum harus ditegakkan
2. keadilan harus ditegakkan
3. peningkatan kesejahteraan rakyat
4. pemerataan pembangunan di semua aspek kehidupan
5. menanamkan nilai juang bela negara
6. setiap warga negara Indonesia memiliki dan komitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI



D. Akitivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Persiapan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta membaca modul KP 6 secara mandiri. • Peserta menyiapkan laptop, modul, alat tulis. 	
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta melakukan curah pendapat tentang Tantangan NKRI dari dalam dan luar negeri. • Peserta menyimak penjelasan instruktur tentang tujuan dan aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mengelompok menjadi 3 kelompok (atau sesuai kebutuhan) 2. Tiap kelompok mengumpulkan informasi melalui modul, internet atau bahan lainnya. 3. Tiap kelompok mendiskusikan dan mengerjakan LK yang ada. 4. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya. 5. Peserta yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. 6. Peserta menyimak penguatan yang disampaikan oleh instruktur. 7. Peserta menyusun soal USBN, 3 soal pilihan ganda dan 3 soal subyektif berdasarkan LK.6.3. 8. Peserta secara acak mempresentasikan hasil penyusunan soalnya. 9. Peserta lain memberikan komentar dan saran terhadap penyusunan soal yang dipresentasikan. 10. Peserta menyimak penguatan tentang penyusunan soal yang disampaikan oleh instruktur. 	
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta menyimpulkan hasil pembelajaran. • Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	
Pasca tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diklat latihan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam bagian modul KP 1 • Peserta diklat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. • Melaksanakan rencana tindak lanjut 	

2. Moda Tatap Muka In-On-In





Kegiatan Pembelajaran 6

a. Aktivitas In -1

- 1) Peserta bersama-sama menyanyikan lagu-lagu daerah setempat.
- 2) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 3) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 6.1. dan LK 6.2. secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaannya dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 6.1.

1. Ancaman keutuhan NKRI tidak hanya berasal dari luar, namun juga dari dalam negeri. Identifikasi dalam sejarah Indonesia ancaman yang datang dari dalam negeri.
2. Berikan contoh sikap dan perilaku komitmen untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

LK 6.2.



AKTIVITAS PENGEMBANGAN BUTIR SOAL USBN

Prosedur:

1. Cermatilah kisi-kisi untuk penyusunan soal USBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam tabel 4.
2. Buatlah kisi-kisi soal UN/USBN pada lingkup materi yang dipelajari sesuai format di bawah ini!
3. Buatlah soal USBN pada lingkup materi yang dipelajari pada modul ini berdasarkan kisi-kisi yang telah Saudara kembangkan!
4. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan konsep HOTS berdasarkan acuan yang terdapat dalam Kegiatan Pembelajaran 8.
5. Buatlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 3 soal!
6. Buatlah soal uraian (Essay) sebanyak 3 soal!

Format Kisi-Kisi Soal

No. Urut	Kompetensi Dasar	Bahan Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1.					PG dan Essay Level pengetahuan dan pemahaman
2.					PG dan Essay Level Aplikasi
3.					PG dan Essay Level Penalaran

Format Kartu Soal

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: VII
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan Pemahaman
Materi	:
Bentuk Soal	: Pilihan Ganda/ uraian
BAGIAN SOAL DISINI	



Kegiatan Pembelajaran 6

Kunci Jawaban :

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung makna proklamasi adalah...
 - A. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.
 - B. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.
 - C. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
 - D. Proklamasi mengakhiri perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Unsur terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara deklaratif adalah adanya....
 - A. pengakuan dari PBB
 - B. pengakuan negara lain
 - C. pengakuan kedaulatan
 - D. proklamasi kemerdekaan
3. Dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya yang bernama negara, sebagaimana negara federasi atau serikat. Hal ini termasuk dalam...
 - A. Landasan Hukum NKRI
 - B. Hakikat NKRI
 - C. Yuridiksi NKRI
 - D. Filsafat NKRI
4. Ancaman wilayah terhadap bangsa dan negara Indonesia, dapat berupa ...
 - A. tawuran
 - B. demonstrasi

- C. kerusuhan massa
 - D. pelanggaran wilayah
5. Makna proklamasi bangsa Indonesia bagi dunia luar adalah....
- A. wajib dihormati oleh negara negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional.
 - B. untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia,
 - C. mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia
 - D. dengan berdirinya negara baru ini maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut.

F. Rangkuman

1. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dilalui dengan waktu yang panjang dan dengan cara fisik maupun diplomatik.
2. Perjuangan bangsa Indonesia mulai mendapat titik terang menjelang kekalahan Jepang perang melawan sukutu dengan dipanggilnya Radjiman Widjoningrat dan kawan-kawan ke Saigon.
3. Berawal di bentuknya BPUPKI oleh Jepang membawa angin segar dan semangat yang tinggi oleh para founding father . Pada sidang BPUPKI I dan II menghasilkan konsep dasar negara dan UUD.
4. Sebelum BPUPKI dibubarkan, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan kembali dasar negara dan UUD 1945.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dan dalam sidang perdananya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil (1) Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, (2) memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil



Kegiatan Pembelajaran 6

Presiden, dan (3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara aktu dibantu oleh Komite Nasional .

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 6, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 6.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 7 untuk kompetensi Pedagogi. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 6 dengan baik.

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok
Kompetensi

PEDAGOGI

Dasar-dasar Perencanaan
Pembelajaran, Penilaian dan
Penelitian Tindakan
Kelas SMP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2018

Kegiatan Pembelajaran 7

Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran PPKn SMP

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik
2. Menjelaskan Langkah-langkah pendekatan saintifik
3. Menjelaskan pengertian model pembelajaran,
4. Mendeskripsikan kriteria pemilihan model pembelajaran
5. **Menunjukkan** macam-macam model pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat dapat :

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik dengan baik.
2. Menjelaskan Langkah-langkah pendekatan saintifik dengan baik.
3. **Membuat contoh pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar. Belum ditemukan dalam uraiannya!**
4. Menjelaskan pengertian model Pembelajaran dengan baik
5. Mendeskripsikan kriteria pemilihan model pembelajaran dengan baik
6. **Menunjukkan** macam-macam model pembelajaran dengan baik
Apa hanya menunjukkan? Tidak mencermati atau berlatih mempraktikkan?

C. Uraian Materi

1. Konsep Pendekatan Saintifik.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual (tuliskan yang dianjurkan dalam kurikulum, seperti **pembelajaran berbasis masalah, inquiry dll..** Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri,



Kegiatan Pembelajaran 7

sintak, pengaturan, dan budaya misalnya *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry learning* dan lain-lain.

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (*direct instructional*) dan tidak langsung (*indirect instructional*). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (*instructional effect*).

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap.

Dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami,

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

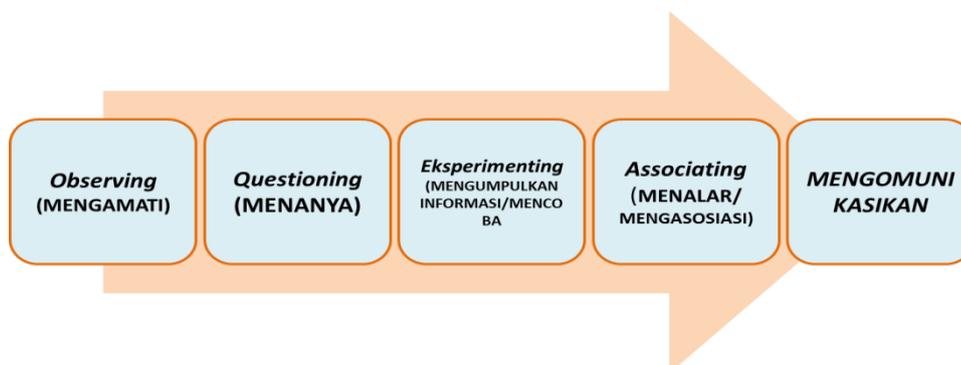
Langkah-langkah pembelajaran:

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ranah sikap menggigit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggigit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggigit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.”

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui:

- a. Mengamati;
- b. Menanya;
- c. Mengumpulkan informasi/mencoba;
- d. Menalar/mengasosiasi; dan
- e. Mengomunikasikan.



Gambar 6. Langkah-Langkah Pembelajaran Saintifik

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam

Kegiatan Pembelajaran 7

pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (*inductive reasoning*) dibandingkan dengan penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan.

a. Langkah-langkah pendekatan saintifik dijelaskan sesuai pedoman

Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. Deskripsi Langkah Pembelajaran

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
Mengamati (<i>observing</i>)	Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat.	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (<i>on task</i>) yang digunakan untuk mengamati.
Menanya (<i>questioning</i>)	Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
Mengumpulkan informasi/mencoba (<i>experimenting</i>)	Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ mengembangkan.	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/Mengasosia	Mengolah informasi yang	Mengembangkan

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
si (<i>associating</i>)	sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.	interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori.
		Menyintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/ teori/ yang berbeda dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan (<i>communicating</i>)	Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

2. Model Pembelajaran PPKn SMP

Pengertian Model Pembelajaran.

Model pembelajaran dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. dalam penerapannya itu gaya yang dilakukan tersebut mencakup



Kegiatan Pembelajaran 7

beberapa hal strategi atau prosedur agar tujuan yang ingin dikehendaki dapat tercapai. Banyak para ahli pendidikan mengungkapkan berbagai pendapatnya mengenai pengertian model pembelajaran.

Model pembelajaran tidak terlepas dari kata strategi atau model pembelajaran identik dengan istilah strategi. model pembelajaran dan strategi merupakan satu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus beriringan, sejalan, dan saling mempengaruhi. Istilah strategi itu sendiri dapat diuraikan sebagai taktik atau sesuatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu strategi dalam pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama, terpadu untuk menciptakan hasil belajar yang diinginkan guru pada siswa. agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat secara optimal tercapai, maka perlu suatu metode yang diterapkan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa dalam satu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Contohnya bila ingin melaksanakan sebuah strategi ekspositori misalnya, dapat menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, atau metode diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mudah didapatkan di sekitar sekolah yaitu bisa dengan menambahkan media pembelajaran. Oleh sebab itu, strategi berbeda dengan metode. Strategi lebih menunjukkan pada sebuah perencanaan atau yang biasa dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tentu dengan maksud untuk mencapai sesuatu. sedangkan metode adalah suatu cara tersendiri yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah *a plan of operation achieving something*, sedangkan metode adalah *a way in achieving something*.

Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. berbagai ahli pendidikan menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung dalam model-model pembelajaran ini banyak diamati oleh peneliti Joyce & Weil. Mereka mempelajari dan menerapkan berbagai model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang kemudian dikelompokkan menjadi empat model pembelajaran. dan mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, mendidik dan membimbing siswa terhadap pembelajaran di kelas.

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM). Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Dengan penerapan kurikulum KTSP dan tuntutan untuk mengembangkan model pembelajaran kreatif maka Guru harus pula mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia pendidikan terkini. Guru harus berani berinovasi dan beradaptasi dengan metode pembelajaran PAIKEM seperti Talking Stick, *Example non Example*, Think Pair Share dan tidak hanya terpaku pada Metode Ceramah saja. Untuk memperjelas mengapa model pembelajaran perlu dikembangkan secara berkesinambungan, kita harus kembali pada pengertian model pembelajaran secara umum.

b. Kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP

Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran

yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat dinampakkan siswa setelah proses belajar mengajar. Tujuan pengajaran pada ranah pengetahuan atau pengenalan tingkat ingatan, memerlukan model pengajaran yang berbeda dengan ranah pengenalan tingkat analisis atau evaluasi.

2. Materi Pembelajaran

Yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran. Materi pengajaran yang berupa fakta memerlukan model yang berbeda dari model yang dipakai untuk mengajarkan materi yang berupa konsep, atau prosedur atau kaidah.

3. Besar Kelas atau Jumlah Siswa

Yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang bersangkutan. Kelas dengan 5 – 10 orang siswa memerlukan model pengajaran yang berbeda dari model pengajaran untuk kelas dengan 50 – 100 orang siswa

4. Kemampuan Siswa

Yaitu kemampuan siswa untuk menangkap dan mengembangkan bahan



Kegiatan Pembelajaran 7

pengajaran yang diajarkan. Hal ini banyak bergantung pada tingkat kematangan siswa baik mental, fisik dan intelektualnya.

5. Kemampuan Guru

Yaitu kemampuan guru dalam menggunakan berbagai jenis model pengajaran.

6. Fasilitas Yang Tersedia

Yaitu bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pengajaran

7. Waktu yang tersedia

Yaitu jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk menyajikan bahan pengajaran guna mencapai tujuan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk materi yang banyak yang akan disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan model yang berbeda dengan penyajian bahan yang relative sedikit tetapi waktu penyajian relatif cukup banyak.

(Sumber: <http://ruzirahmawati.blogspot.co.id/2011/10/memilih-model-mengajar-untuk-dipelajari.html>)

c. Macam-macam model pembelajaran PPKn SMP.

Model Pembelajaran yang disarankan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 antara lain meliputi: *Problem Based Learning (PBL)*, *Project Based Learning (PjBL)*, dan *Discovery Learning (DL)*.

a. Model pembelajaran berbasis masalah/*Problem Based Learning (PBL)*

Problem Based Learning (PBL) merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (*real world*). model pembelajaran ini menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.

Prinsip Proses Pembelajaran PBL

Prinsip-prinsip PBL yang harus diperhatikan meliputi: konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan dan

penilaiannya.

1) Konsep Dasar

Pada pembelajaran ini, guru dapat memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau *link* dan *skill* yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat mendapatkan 'peta' yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara mendalam.

2) Pendefinisian Masalah (*Defining the Problem*)

Prinsip pendefinisian masalah artinya guru menyampaikan skenario atau permasalahan, selanjutnya peserta didik melakukan berbagai kegiatan. *Pertama*, *brainstorming* dengan cara: semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. *Kedua*, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus. *Ketiga*, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu permasalahan yang didapat.

Guru memvalidasi pilihan-pilihan yang diambil peserta didik yang akhirnya diharapkan memiliki gambaran jelas tentang apa saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk menjembatannya.

3) Pembelajaran Mandiri

Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi misalnya dari artikel tertulis di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tujuan utama tahap investigasi, yaitu: (1) agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas secara relevan dan dapat dipahami.

4) Pertukaran Pengetahuan

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk.

Langkah langkah Pelaksanaan PBL

Secara sederhana, kegiatan pembelajaran dapat dituliskan sebagai berikut

FASE-FASE	PERAN GURU
Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah.	1. Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 2. Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. 3. Guru menyajikan permasalahan riil yang terjadi di masyarakat .
Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik.	Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok.	Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.	Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman.
Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.	Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari /meminta kelompok presentasi hasil kerja.

Langkah-langkah kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fase 1: Mengorientasikan Peserta Didik pada Masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Serta dijelaskan bagaimana guru akan

mengevaluasi proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu sebagai berikut.

- a) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadikan peserta didik mandiri.
- b) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.
- c) Selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
- d) Selama tahap analisis dan penjelasan, peserta didik akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.

2) Fase 2: Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan saling berbagi (*sharing*) antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok peserta didik dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.

3) Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri.

4) Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan hasil karya dan pameran. Hasil karya lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia.

5) Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

b. Pembelajaran Berbasis Proyek atau *Project Based Learning* (PjBL)

Pembelajaran Berbasis Proyek atau *Project Based Learning* (PjBL) adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan (proyek) yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan peserta didik mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya.

Model pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, peserta didik terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner, dan melibatkan peserta didik sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan (*student centered*).

Dalam pelaksanaannya, PBL bertitik tolak dari masalah sebagai langkah awal sebelum mengumpulkan data dan informasi dengan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan sebagai wahana pembelajaran dalam memahami permasalahan yang kompleks dan melatih serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan investigasi dan melakukan kajian untuk menemukan solusi permasalahan.

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang dalam rangka:

- 1) Mendorong dan membiasakan peserta didik untuk menemukan sendiri (*inquiry*), melakukan penelitian/pengkajian, menerapkan keterampilan dalam merencanakan (*planning skills*), berfikir kritis (*critical thinking*), dan penyelesaian masalah (*problem-solving skills*) dalam menuntaskan suatu kegiatan/proyek.
- 2) Mendorong peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu ke dalam berbagai konteks (*a variety of contexts*) dalam menuntaskan kegiatan/proyek yang dikerjakan.
- 3) Memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar menerapkan interpersonal skills dan berkolaborasi dalam suatu tim sebagaimana orang bekerjasama dalam sebuah tim dalam lingkungan kerja atau kehidupan nyata.

Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja;
- 2) Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik;
- 3) Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan;
- 4) Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan;
- 5) Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu;
- 6) Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan;
- 7) Produk akhir aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif; dan



Kegiatan Pembelajaran 7

8) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyek sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari peserta didik.

Langkah-langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek

1) Langkah 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.

2) Langkah 2: Mendesain Perencanaan Proyek

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.

3) Langkah 3: Menyusun Jadwal

Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) menetapkan batas penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

4) Langkah 4: Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru

berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

5) Langkah 5: Menguji Hasil

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

6) Langkah 6: Mengevaluasi Pengalaman

Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

c. Model pembelajaran *Discovery Learning (DL)*

Discovery mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (*inquiry*) dan *Problem Solving*. Tidak ada perbedaan yang prinsipial pada ketiga istilah ini, pada *Discovery Learning* lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan kepada peserta didik merupakan masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa guru, sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan *Problem Solving* lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pada *Discovery Learning* materi yang tidak disampaikan secara final, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui selanjutnya diteruskan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk



Kegiatan Pembelajaran 7

(konstruktif) apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu laporan akhir.

Penggunaan *Discovery Learning*, ingin mengubah kondisi belajar dari pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Mengubah modus *Ekspository* dimanapeserta didik hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus *Discovery* dimana peserta didik menemukan informasi sendiri.

Langkah-langkah pelaksanaan dalam Proses Pembelajaran

1) Perencanaan

Pada langkah perencanaan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Menentukan tujuan pembelajaran.
- b) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya).
- c) Memilih materi pelajaran.
- d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi).
- e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi.
- f) Memnyusun tugas untuk dipelajari peserta didik.
- g) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.
- h) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

2) Pelaksanaan

Ada beberapa prosedur atau tahap yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yakni:

a) Tahap stimulasi/pemberian rangsangan

Pada tahap pemberian rangsangan peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan banyak pertanyaan, pro-kontra dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, melempar kasus,

memutar video, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada peserta didik agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Contoh kegiatan pemberian rangsangan : wacana konvoi peserta didik untuk merayakan kelulusan, hukuman mati bagi bandar narkoba, video pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

b) Tahap pernyataan/ identifikasi masalah

Setelah dilakukan tahap stimulasi, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). Contoh pernyataan: hukuman mati bagi bandar narkoba melanggar HAM, pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

c) Tahap pengumpulan data.

Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

d) Tahap pengolahan data

Pada tahap pengolahan data peserta didik melakukan analisis atas data, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan dokumen yang selanjutnya ditafsirkan sesuai rumusan masalah, sebagaimana pendapat Syah (2004:244) yang mengatakan bahwa pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui



Kegiatan Pembelajaran 7

wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan.

e) Tahap pembuktian

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

f) Tahap menarik kesimpulan/generalisasi

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

- a. Peserta berdoa bersama-sama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
- b. Peserta bersama-sama menyanyikan lagu-lagu nasional.
- c. Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- d. Peserta secara mandiri membaca cerdas materi pembelajaran.
- e. Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.
- f. Peserta mengerjakan LK 7.1 secara kelompok.
- g. Peserta menyajikan hasil kerja kelompok dan peserta lain menyampaikan pertanyaan, saran, dan komentar. Sedangkan fasilitator memberikan klarifikasi dan konfirmasi berdasarkan hasil pengamatannya.
- h. Peserta dan fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- i. Fasilitator melakukan refleksi, memberikan umpan balik, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut.

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 2) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 3) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 7.1 secara kelompok sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 7.1 dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 7.1.

Bersama kelompok, buatlah satu model pembelajaran yang menggambarkan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP

Kompetensi Dasar	:	
Topik	:	
Sub Topik	:	
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	1. 2. 3. Dst.
Alokasi Waktu	:	2 kali pertemuan (6 JP)



Kegiatan Pembelajaran 7

TAHAP	KEGIATAN PEMBELAJARAN

E. Latihan Kerja/ Kasus /Tugas

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Pencarian kebenaran dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik harus ilmiah, maksudnya adalah
 - A. pembelajaran harus melibatkan masyarakat
 - B. berdasar pada bukti dari obyek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur
 - C. pembelajaran harus dilaksanakan secara terencana dan terarah sesuai teori belajar
 - D. kegiatan pembelajaran harus mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan
2. Aktivitas peserta didik:
 - 1) melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis atau produk lainnya;
 - 2) generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan dari informasi yang diperoleh dari sumber lain;



- 3) analisis terhadap suatu permasalahan baik secara individual ataupun dapat dilakukan dalam kelompok;
- 4) membandingkan informasi dari situasi yang terjadi saat ini dengan sumber bacaan yang lebih mendalam.

Berdasarkan aktivitas di atas yang merupakan kegiatan mengasosiasikan dalam pembelajaran PPKn SMP berdasarkan Kurikulum 2013, ditunjukkan pada nomor

- A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 2, dan 4
 - C. 1, 3, dan 4
 - D. 2, 3, dan 4
3. Karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah adalah menjadikan masalah sebagai acuan utama dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu contoh masalah pembelajaran PPKn SMP yang bisa ditindaklanjuti dengan penerapan model ini adalah
- A. kerusakan hutan di daerah setempat
 - B. kesemrawutan lalu lintas di depan sekolah
 - C. keterbatasan buku teks dalam pembelajaran
 - D. tingkah laku guru dan peserta dalam pembelajaran
4. Pembelajaran PPKn dengan *discovery learning*, antara lain dilakukan dengan metode simulasi, yakni.....
- A. memerankan tokoh sesuai dengan kejadian nyata
 - B. mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan norma
 - C. bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi atas permasalahan dunia nyata
 - D. menghadapkan peserta didik pada sesuatu yang membingungkan agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahannya



Kegiatan Pembelajaran 7

5. Model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran PPKn SMP dikenal dengan sebutan proyek kewarganegaraan. Salah satu langkah dari model pembelajaran berbasis proyek adalah
 - A. penentuan pertanyaan mendasar sesuai dengan kebutuhan siswa
 - B. membuat pertanyaan sesuai dengan permasalahan
 - C. mempersiapkan pertanyaan mendasar
 - D. penentuan pertanyaan mendasar

F. Rangkuman

1. Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (*direct instructional*) dan tidak langsung (*indirect instructional*). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP.
2. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran
3. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sedemikain rupa hingga tujuan atau kompetensi pembelajaran yangtelah ditetapkan dapat tercapai.
4. Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran didasarkan pada tujuan, materi pembelajaran, pengelolaan kelas, kemampuan siswa dan guru untuk melaksanakan, fasilitas dan waktu yang tersedia.

5. Model Pembelajaran yang disarankan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 antara lain meliputi: *Problem Based Learning (PBL)*, *Project Based Learning (PjBL)*, dan *Discovery Learning (DL)*.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 7, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$



Kegiatan Pembelajaran 7

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 8. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 7 dengan baik.



Kegiatan Pembelajaran 8

Penyusunan Soal HOTS

A. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat mampu menyusun Soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*).

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memahami pengertian pembelajaran *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*
2. Mengidentifikasi jenis-jenis soal LOTS, MOTS, dan HOTS dengan tepat
3. Menyusun soal *Higher Order Thinking Skills (HOTS)* bentuk pilihan ganda dan atau uraian pada mata pelajaran PPKn SMP

C. Uraian Materi

1. Penilaian Pembelajaran *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*

Pengertian Pembelajaran HOTS

Laju perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat pada era globalisasi, menjadikan tuntutan kompetensi semakin tinggi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi yang harus dicapai adalah kompetensi di bidang pengolahan informasi, yang nantinya pengolahan informasi ini dapat di terapkan oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Kurikulum 2013 dipandang sebagai kurikulum yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan di era globalisasi, dengan penerapan *High Order Thinking skills (HOTS)* pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Sehingga output yang diharapkan nantinya adalah peserta didik dengan kualitas karakter yang religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan peduli. Serta melatih siswa untuk memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara membiasakan peserta didik untuk:



Kegiatan Pembelajaran 8

- a) berpikir kritis (*Critical Thinking*), yakni proses konseptualisasi, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi melalui proses berfikir deduktif dan induktif. (Sintesis dari Scriven dan Paul, 1984; Facione, dkk., 1995; Scheffer dan Rubenfield, 2000)
- b) Meningkatkan kreativitas, yakni meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan suatu ide, konsep, teori, prosedur, dan produk. (sintesis antara Fullan, 2013 dan OECD, 2014)
- c) Komunikasi (*Communication*), yakni kemampuan mengemukakan pendapat atau hasil pemikiran yang disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan dengan menggunakan IT, serta kemampuan dalam mendengar dan memahami pesan. (Revisi dari Fullan, 2013, Canada, 2014)
- d) Kerjasama (*Collaboration*), yakni kemampuan bekerjasama dalam kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan, menyelesaikan konflik, serta membuat keputusan dan negosiasi untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana kerjasama ini dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun dilakukan melalui media sosial.

Peran Soal *High Order Thinking skills* (HOTS) dalam penilaian pembelajaran

Penggunaan soal-soal *High Order Thinking skills* (HOTS) bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, sehingga dalam berbagai penilaian sumatif, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal dengan menggunakan soal HOTS. Selain itu dalam penilaian pembelajaran, soal HOTS memiliki beberapa peran. Kemendikbud (2017 : 23) menjelaskan bahwa terdapat 4 peran soal HOTS dalam penilaian, yang antara lain:

a. Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyosong abad ke-21

Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21 yakni: a)

memiliki karakter yang baik (beriman dan taqwa, rasa ingin tahu, pantang menyerah, kepekaan sosial dan berbudaya, mampu beradaptasi, serta memiliki daya saing yang tinggi); b) memiliki sejumlah kompetensi (berpikir kritis dan kreatif, problem solving, kolaborasi, dan komunikasi); serta c) menguasai literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.

Penyajian soal-soal HOTS dalam Penilaian dapat melatih peserta didik untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 di atas. Melalui penilaian berbasis pada soal-soal HOTS, keterampilan berpikir kritis (*creative thinking and doing*), kreativitas (*creativity*) dan rasa percaya diri (*learning self reliance*), akan dibangun melalui kegiatan latihan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari (*problem-solving*).

b. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah

Dalam Penilaian guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal *HOTS* secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas guru dalam hal pemilihan stimulus yang berbasis permasalahan daerah di lingkungan satuan pendidikan sangat penting. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai stimulus kontekstual. Dengan demikian stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal *HOTS* menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh peserta didik. Di samping itu, penyajian soal-soal *HOTS* dalam ujian sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan cinta terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya. Sehingga peserta didik merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di daerahnya.

c. Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik

Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari



Kegiatan Pembelajaran 8

di dalam kelas, agar terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Dengan demikian peserta didik merasakan bahwa materi pelajaran yang diperoleh di dalam kelas berguna dan dapat dijadikan bekal untuk terjun di masyarakat. Tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan stimulus kontekstual dan menarik dalam Penilaian, sehingga munculnya soal-soal berbasis soal-soal *HOTS*, yang diharapkan dapat menambah motivasi belajar peserta didik.

d. Meningkatkan Mutu Penilaian

Penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal *HOTS*, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Ditinjau dari hasil yang dicapai dalam US dan UN, terdapat 3 kategori sekolah yaitu: (a) sekolah unggul, apabila rerata nilai US lebih kecil daripada rerata UN; (b) sekolah biasa, apabila rerata nilai US tinggi diikuti dengan rerata nilai UN yang tinggi dan sebaliknya nilai rerata US rendah diikuti oleh rerata nilai UN juga rendah; dan (c) sekolah yang perlu dibina bila rerata nilai US lebih besar daripada rerata nilai UN.

Masih banyak satuan pendidikan dalam kategori sekolah yang perlu dibina. Indikatornya adalah rerata nilai US lebih besar daripada rerata nilai UN. Ada kemungkinan soal-soal buatan guru level kognitifnya lebih rendah daripada soal-soal pada UN. Umumnya soal-soal US yang disusun oleh guru selama ini, kebanyakan hanya mengukur level 1 dan level 2 saja. Penyebab lainnya adalah belum disisipkannya soal-soal *HOTS* dalam US yang menyebabkan peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal-soal *HOTS*. Di sisi lain, dalam soal-soal UN peserta didik dituntut memiliki kemampuan mengerjakan soal-soal *HOTS*. Setiap tahun persentase soal-soal *HOTS* yang disisipkan dalam soal UN terus ditingkatkan. Sebagai contoh pada UN tahun pelajaran 2015/2016 kira-kira terdapat 20% soal-soal *HOTS*. Oleh karena itu, agar rerata nilai US tidak berbeda jauh dengan rerata nilai UN, maka dalam penyusunan soal-soal US agar disisipkan soal-soal *HOTS*.

2. Kata Kerja Operasional (KKO)

Dalam pelaksanaan penilaian HOTS, kata kerja operasional sangat penting untuk dipahami. Pada Kurikulum 2013, Kata Kerja yang digunakan adalah Taksonomi Bloom yang telah di sempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Aspek kognitif tersebut terdiri atas kemampuan mengetahui (knowing-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan (aplying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6).

Berikut ini contoh kata kerja operasional Bloom revisi Anderson dan Krathwohl (2001) untuk aspek penilaian sikap spiritual, sikap sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan pada mata pelajaran PPKn.

Kata Kerja Ranah Pengetahuan Menurut Anderson dan Khratwohl (Revisi Bloom) 2001

Tabel 5 Kata Kerja dan Deskripsi Perilaku yang Dapat Diukur

No.	Level Taksonomi	Kata Kerja Operasional yang Dapat Diukur	Deskripsi Perilaku
1.	(C1) Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi 2. Menyebutkan 3. Mendaftar 4. Menunjukkan 5. Mendefinisikan 6. Melabel 	Mengingat atau menyadari informasi.
2.	(C2) Memahami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan 2. Mendeskripsikan 3. Mengklasifikasi 4. Mencontohkan 5. Meringkas 6. Mengelompokkan 	Memahami makna, menetapkan kembali dalam kata-kata sendiri, menafsirkan, ekstrapolasi, menerjemahkan, merangkum, membuat ringkasan.

Kegiatan Pembelajaran 8

3.	(C3) Menerapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan 2. Menerapkan 3. Memecahkan 4. Mengubah 5. Menanggapi 6. Menentukan 	Menggunakan atau menerapkan pengetahuan, mempraktikkan teori, menggunakan pengetahuan dalam menanggapi keadaan nyata, merespon yang dipahami.
4.	(C4) Menganalisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis 2. Menguji 3. Mengukur 4. Membandingkan 5. Menafsirkan 6. Membagi 	Menafsirkan elemen, prinsip-prinsip organisasi, struktur, konstruksi, hubungan internal, kualitas, keandalan komponen individu, menyeleksi hasil penerapannya.
5.	(C4) Mengevaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai 2. Meninjau 3. Menyelidiki 4. Mengelola 5. Membenarkan 6. Mempertahankan 	Menilai efektivitas seluruh konsep, dalam hubungannya dengan nilai-nilai output, khasiat, kelangsungan hidup; berpikir kritis, perbandingan strategis dan review; penghakiman yang berkaitan dengan kriteria eksternal, mengontrol.
6.	(C6) Mencipta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan 2. Merevisi 3. Mengembangkan 4. Membangun 5. Mengintegrasikan 6. Memodifikasi 	Mengembangkan struktur unik baru, sistem, model, pendekatan, ide-ide, berpikir kreatif, operasi.

Tabel 6 Kata Kerja Ranah Sikap (Spiritual dan Sosial)

	Menerima	Menanggapi	Menghargai	Menghayati	Mengamalkan
Sikap Spiritual	1. Menerima aturan; norma; perintah; larangan agama	1. Menjalankan 2. Melaksanakan 3. Mentaati aturan; norma; perintah; larangan agama	1. Mendahulukan 2. Menunjung tinggi 3. Mengutamakan aturan; norma; perintah; larangan agama	1. Meyakini 2. Mengajak 3. Menyebarluaskan aturan; norma; perintah; larangan agama	1. Menjadi teladan 2. Membela 3. Memelihara pelaksanaan aturan, norma, perintah, larangan agama
Sikap Sosial	1. Menerima keutamaan nilai kejujuran; disiplin; tanggung jawab; peduli; santun; resensif; proaktif;	1. Menjalankan 2. Melaksanakan 3. Mentaati perintah untuk berperilaku jujur, disiplin; tanggung jawab; peduli; santun; resensif; proaktif;	1. Menjunjung tinggi 2. Menghormati Mengutamakan kejujuran; disiplin; tanggung jawab; peduli; santun; resensif; proaktif;	1. Meyakini 2. Mengajak 3. Menyeberluaskan perilaku jujur, disiplin; tanggung jawab; peduli; santun; resensif; proaktif;	1. Menjadi teladan 2. Membela dan Memelihara kejujuran; disiplin; tanggung jawab; peduli; santun; resensif; proaktif;

Tabel 7: Kata Kerja Ranah Keterampilan

	Mengamati	Menanya	Mencoba	Menalar	Menyaji	Mencipta
Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> Melihat Mendengar Mencermati Menyimak Membaca 	<ol style="list-style-type: none"> Mempertanyakan Mengkritisikan Mendiskusikan Mengidentifikasi masalah Merumuskan masalah Menyusun hipotesis 	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data/informasi Mencatat Menyalin Menyadur Mengutip Merangkum Mengidentifikasi Menjawab 	<ol style="list-style-type: none"> Mengolah data Mengelompokkan Membuat pernyataan Menegaskan Menyimpulkan 	<ol style="list-style-type: none"> Mempresentasikan Menyampaikan laporan lisan Menceritakan Menyaji melalui website/blog 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat ide/gagasan Mendesain Merekomendasikan Mengusulkan Menakar Memprediksi Menilai
Konkret	<ol style="list-style-type: none"> Memegang Melihat Meraba Mencicipi 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pertanyaan Mempertanyakan Mengajukan pertanyaan 	<ol style="list-style-type: none"> Menirukan Menghidupkan/mematikan Mengoperasikan/ menjalankan Merangkai Melakukan instruksi kerja Melaksanakan percobaan Mengukur Mengumpulkan data Menghitung 	<ol style="list-style-type: none"> Mengelompokkan data Membuat table Mengolah data Membuat grafik/dll Menghitung regresi Menghitung error 	<ol style="list-style-type: none"> Menulis laporan Menyusun bahan presentasi Mempresentasikan Membuat video laporan Menyusun gambar/foto Mengupload video/presentasi Menyaji melalui website/blog 	<ol style="list-style-type: none"> Memodifikasi Memproduksi Merekonstruksi Menghitung estimasi Menentukan nilai/harga

					3. Mengirim email laporan	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

4. Level Kognitif Pada Soal

Level kognitif merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok. Anderson & Krathwohl (2001) mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut:

Tabel 8: Level kognitif pada soal

No	Aspek Kognitif	Level Soal	Penguasaan Kompetensi
1	Mengingat	Level 1	a. Pengertian istilah dan nama b. Pengertian teori c. Pemahaman dasar grafik/tabel/visual d. Pemahaman konsep e. Isi definisi
2	Memahami		
3	Menerapkan	Level 2	a. Aplikasi rumus/teori b. Interpretasi terhadap suatu teori/tabel/visual c. Memecahkan masalah informasi dalam konteks d. Aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks e. Interpretasi data dalam konteks
4	Menganalisis	Level 3	a. Kecakapan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar b. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan
5	Mengevaluasi		
6	Mencipta		



Kegiatan Pembelajaran 8

			<p>masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda</p> <p>c. Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya</p> <p>d. Kecapakan dalam berkomunikasi</p>
--	--	--	--

Dari uraian diatas, Level 1 menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman (*knowing*). Soal pada level 1 dikenal dengan istilah LOTS (*Low Order Thinking skills*). Level 2 menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan (*applying*). Soal pada level 2 dikenal dengan MOTS (*Middle Order Thinking skills*). Dan Level 3 menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran (*reasoning*). Pada level 3 ini termasuk tingkat kognitif analisis, sintesis, dan evaluasi atau yang biasa dikenal dengan soal HOTS (*High Order Thinking skills*).

a) Soal LOTS (*Low Order Thinking skills*)

Soal LOTS adalah soal pada level pertama, yang mana soal LOTS adalah soal yang menggunakan tingkatan berfikir Kognitif 1 dan Kognitif 2 (Kemampuan mengingat dan memahami). Ciri-ciri soal pada level 1 mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Bisa jadi soal dalam level 1 adalah soal yang dianggap sukar oleh peserta didik, karena dalam level ini peserta didik diharuskan dapat mengingat sebuah rumus, peristiwa, menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) dalam melakukan sesuatu. Namun soal pada level satu bukanlah soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah: menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain.





Gambar 7 Ruang Lingkup Soal Level 1`

Contoh soal Low Order Thinking skills pada mata pelajaran PPKn adalah:

Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia adalah....

- Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh
- Terdiri dari banyak perbedaan
- Berbeda tetapi tetap satu
- Tidak pernah bersatu

Penjelasan:

Contoh soal tersebut termasuk dalam soal *Low Order Thinking Skills* (soal level 1) dikarenakan hanya membutuhkan kemampuan mengingat atau menghafal semboyan bangsa Indonesia

b) Soal MOTS (*Middle Order Thinking skills*)

Tingkat kesulitan kedua adalah soal MOTS. Soal MOTS adalah soal yang menggunakan tingkatan berfikir Cognitif 3 (penerapan). Soal-soal

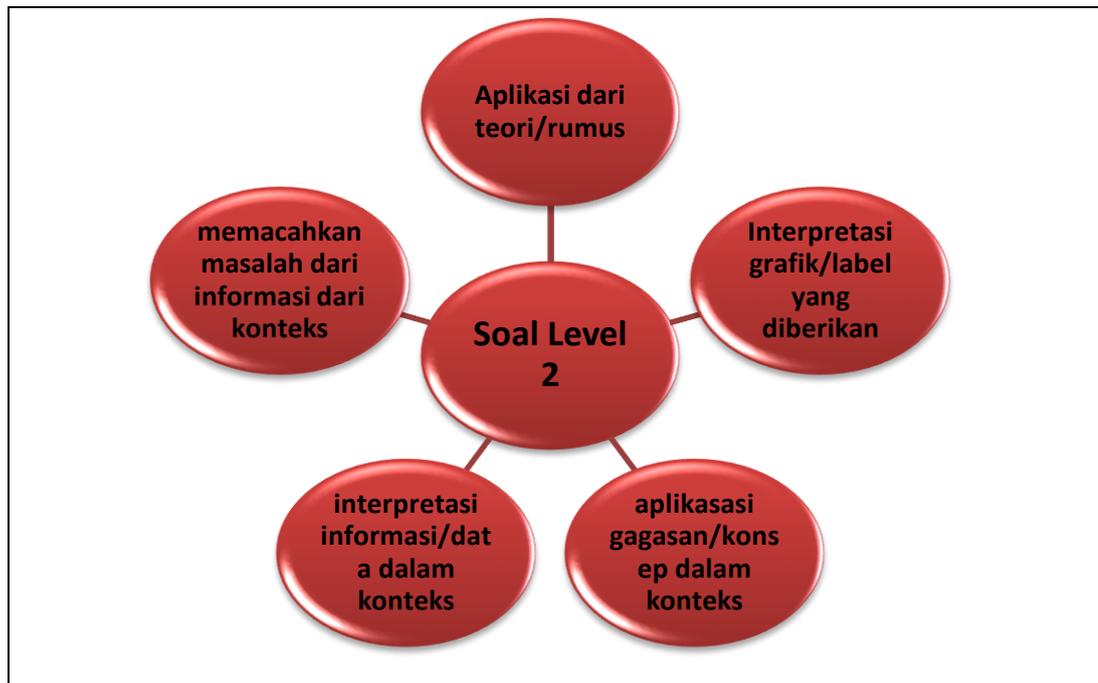


Kegiatan Pembelajaran 8

pada level ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi dari pada level pengetahuan dan pemahaman, dikarenakan dalam soal MOTS berisi mengenai soal menerapkan atau mengaplikasikan (C3).

Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan: a) menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya; atau b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual (situasi lain). Bisa jadi soal-soal pada level 2 merupakan soal kategori sedang atau sukar, karena untuk menjawab soal tersebut peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi/konsep, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) melakukan sesuatu. Selanjutnya pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun soal-soal pada level 2 bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah: menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. lebih lanjut, puspendik mengkategorikan hal-hal yang bisa diukur dalam soal level 2 adalah dengan bagan berikut





Gambar 8 Ruang Lingkup soal level 2

Contoh soal MOTS dalam pembelajaran PPKn adalah:

Daerah kota Malang mempunyai sentra kripik tempe, Strudel, keramik, mebel, *fiber glass*, gerabah. Untuk meningkatkan kualitas produk, pemerintah daerah provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan dan pemberian dana untuk pengembangan industri kecil pada kecamatan Dinoyo. Dalam hal ini, atas dasar tugas pembantuan, daerah Dinoyo melaporkan kegiatan dan penggunaan dana kepada...

- a. Pemerintah kota Malang
- b. Kecamatan Lowokwaru
- c. Provinsi Jawa Timur
- d. Pemerintah Pusat

Penjelasan:

Soal pilihan ganda diatas termasuk dalam MOTS (*Middle Order Thinking skills*) dikarenakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, peserta didik harus mampu mengingat tugas dan fungsi pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan untuk menentukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana.

c) Soal HOTS (*High Order Thinking skills*)

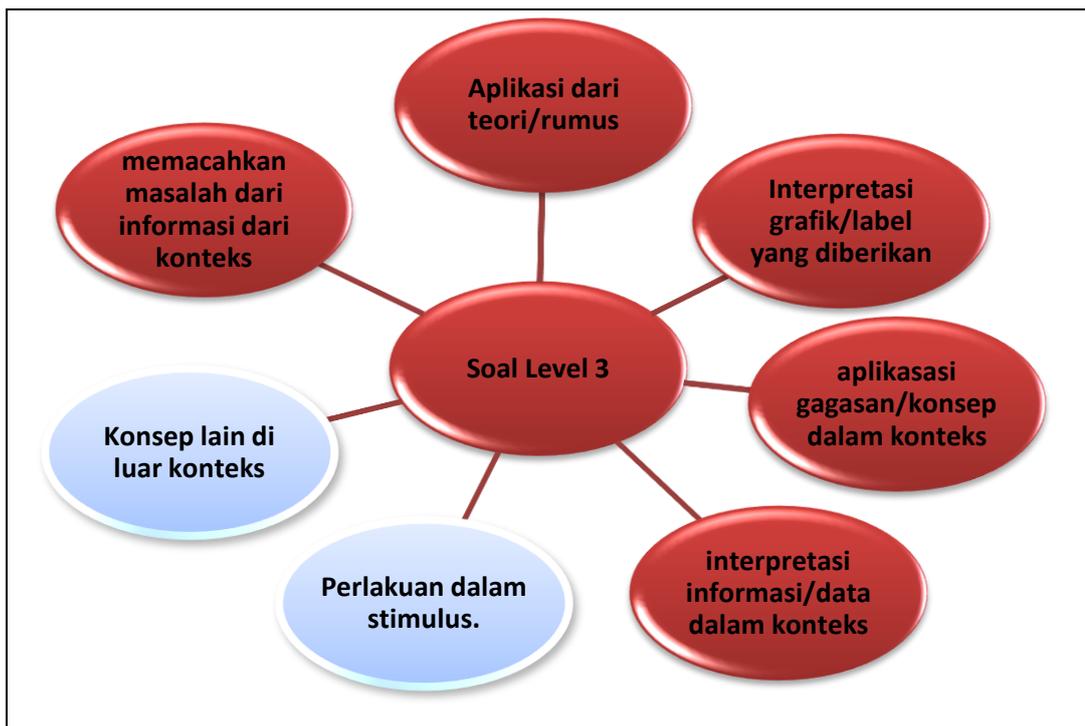
Pembuatan soal dengan menggunakan High Order Thinking skills termasuk dalam level soal ketiga. Pada level ini menggunakan tingkatan berfikir kognitif 4 sampai kognitif 6 (menganalisis – mencipta). Untuk menjawab soal-soal pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin).

Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6). Pada dimensi proses berpikir menganalisis (C4) menuntut kemampuan peserta didik untuk menspesifikasi aspek-aspek/elemen, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir mengevaluasi (C5) menuntut kemampuan peserta didik untuk menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan atau menyalahkan. Sedangkan pada dimensi proses berpikir mengkreasi (C6) menuntut kemampuan peserta didik untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit.

Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan (evaluasi), memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin. Kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain, merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 (penalaran). Kata kerja operasional (KKO) yang sering digunakan antara lain: menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik,

memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan menggubah.

Berkaitan dengan penerapan soal level 3, Puspendik juga menjelaskan bahwa pengukuran soal level 3 pada hakekatnya sama dengan tingkat pemikiran pada level 2. Hanya saja pada level 3, peserta didik di tuntut untuk menghubungkan konsep lain di luar konteks, dan terdapat perlakuan dalam stimulus, sehingga peserta didik dituntut mampu untuk mencari prediksi, keputusan, kesimpulan, dll.



Gambar 9 Ruang Lingkup soal level 3

Contoh soal HOTS (*High Order Thinking skills*) pada materi PPKn adalah:

Perhatikan cerita berikut!

Disebuah perusahaan akan diadakan kegiatan makan bersama seluruh karyawan. Banyak masukan dari karyawan perihal pelaksanaannya. Ada yang menginginkan dilaksanakan pada hari Senin sepulang kerja, ada pula yang menginginkan pada hari Selasa. Oleh karena pada hari Senin sampai Rabu akan ada sosialisasi terkait kemajuan perusahaan, kegiatan diundur pada hari Sabtu. Semua karyawan pun menyetujuinya.

Cerita tersebut merupakan contoh peneladanan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa, yaitu...

- a. Mengutamakan kepentingan umum
- b. Musyawarah mufakat
- c. Nasionalisme
- d. Persatuan

(Sumber: Detik-Detik USBN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun Pelajaran 2017/2018. Oleh: Intan Pariwara)

Penjelasan:

Soal diatas termasuk level 3 (penalaran) karena untuk menjawab pertanyaan tersebut, peserta didik harus mampu mengingat, memahami materi faktual, konseptual, dan prosedural tentang kegiatan musyawarah. Sebelum menentukan ke tujuan musyawarah, peserta didik harus mampu mengetahui melakukan kegiatan musyawarah dan makna musyawarah. Barulah peserta didik mampu untuk menentukan tujuan musyawarah.

3. Langkah-langkah menyusun soal HOTS

Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa penerapan soal-soal *Higher Order Thinking Skills*(HOTS) untuk membiasakan peserta didik agar mampu berfikir kritis dalam pemecahan masalah-masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari

sebelumnya. Selain itu, materi yang disediakan dalam soal HOTS juga tidak selalu tersedia dalam buku pelajaran, sehingga diperlukannya penguasaan terhadap materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, serta keterampilan guru dalam merumuskan stimulus soal yang sesuai dengan kondisi dan situasi di sekitar satuan pendidikan. Agar meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyusunan soal. Penulis haruslah menyusun soal berdasarkan langkah-langkah pembuatan soal dengan baik dan benar.

Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam Kemendikbud (2017:21) yang antara lain:

a. Menganalisis Kompetensi Dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS

Langkah pertama adalah guru harus menganalisa Kompetensi Dasar yang akan dikembangkan dalam soal HOTS. Dalam pemilihan Kompetensi Dasar, Kata Kerja Operasional (KKO) pada Kompetensi Dasar adalah tuntutan minimal yang harus dikembangkan pada indikator soal.

b. Menyusun Indikator Soal HOTS

Setelah menganalisis KD, langkah selanjutnya adalah menyusun indikator soal HOTS dalam Kisi-kisi penilaian, dengan level kognitif yang digunakan adalah kemampuan berfikir untuk menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6). Indikator soal yang baik adalah:

- 1) Memuat tujuan pembelajaran yang hendak diukur
- 2) Memuat satu kata kerja untuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, dan dapat menggunakan lebih dari satu kata kerja untuk jenis soal uraian.
- 3) Berkaitan erat dengan materi pembelajaran
- 4) Dapat dibuat soalnya dengan bentuk yang telah ditetapkan

c. Mencari sumber dan merumuskan stimulus sesuai indikator soal

Dalam pembuatan soal HOTS haruslah menggunakan stimulus-stimulus yang menarik bagi peserta didik, yang artinya penggunaan stimulus dalam soal HOTS adalah pengetahuan yang baru bagi



Kegiatan Pembelajaran 8

peserta didik, sehingga selain menarik rasa keingintahuan peserta didik terhadap peristiwa dalam soal, juga dapat menambah wawasan peserta didik mengenai peristiwa baru yang masih ada kaitannya pada materi pembelajaran. Sedangkan kontekstual adalah soal yang dibuat haruslah dari peristiwa-peristiwa yang nyata dalam kehidupan. Untuk ujian sekolah, guru dapat menggunakan stimulus di lingkungan sekolah dan daerah setempat yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

d. Penulisan butir soal

Butir-butir soal HOTS ditulis dengan mengacu pada kisi-kisi soal yang telah dibuat serta menggunakan kaidah penulisan soal yang baik. Kaidah penulisan soal yang dimaksud adalah:

- 1) Petunjuk pengerjaan dan rumusan soal harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 2) Rumusan soal harus sesuai dengan indikator.
- 3) Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya.
- 4) Rumusan soal tidak boleh mengandung petunjuk (clue) kepada kunci jawaban.
- 5) Materi soal harus sesuai dengan jenjang/jenis pendidikan atau tingkatan kelas.
- 6) Rumusan soal harus mempertimbangkan tingkat kesulitan soal.

Dalam menyusun soal HOTS, kaidah penulisan yang digunakan relatif sama dengan penyusunan soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada isi soal HOTS. Lebih lanjut, Puspendik menjelaskan bahwa Soal HOTS berisi tentang:

- 1) Harus ada stimulus soal. Stimulus dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, grafik, informasi, diagram atau lain-lain dan harus menarik
- 2) Stimulus sangat dianjurkan diambil dari dunia nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat kebaharuan
- 3) Pertanyaan yang diajukan menuntut berfikir secara kritis, logis, metakognisi dan kreatif

4) Menggunakan kaidah penulisan dari bentuk soal yang dibuat.

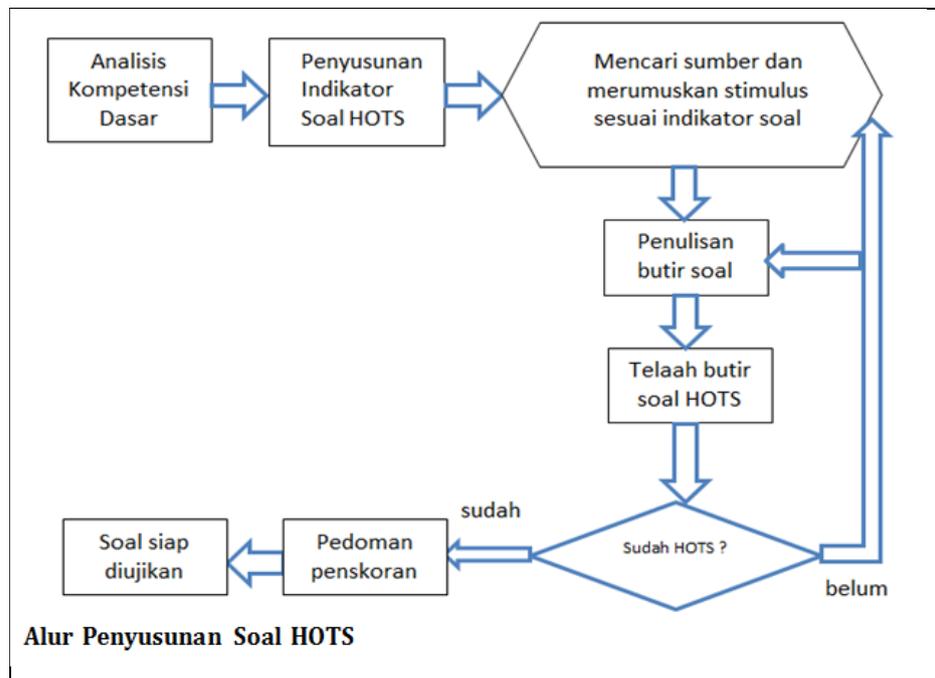
Soal HOTS dibuat berdasarkan pada karakteristik soal HOTS yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Soal HOTS, yang secara rutin sering muncul, bukan lagi menjadi soal HOTS. Agar materi tersebut tetap menjadi soal HOTS, maka yang harus dilakukan adalah ubah konteks, ubah stimulus, ubah grafik/tabel/dll, atau rubah pertanyaannya

e. Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban

Dalam pembuatan soal, setiap soal yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban pada kartu soal. pedoman penskoran dibuat untuk jenis soal uraian, sedangkan kunci jawaban digunakan untuk jenis soal pilihan ganda, atau pilihan ganda kompleks (ya/tidak, benar/salah)

Berkenaan dengan langkah-langkah penyusunan soal HOTS, alur pembuatan soal HOTS dijelaskan lebih lanjut oleh Kemendikbud (2017: 22) melalui bagan berikut:



Gambar 10 Alur Penyusunan Soal HOTS.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

- a. Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- b. Peserta secara individu membaca cerdas materi pembelajaran.
- c. Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.
- d. Peserta mengerjakan LK 8.1 secara mandiri.
- e. Peserta menyajikan hasil kerja, peserta lain menyampaikan pertanyaan, saran, dan komentar. Sedangkan fasilitator memberikan klarifikasi dan konfirmasi berdasarkan hasil pengamatannya.
- f. Peserta dan fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- g. Fasilitator melakukan refleksi, memberikan umpan balik, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut.

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 2) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 3) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 8.1 secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 8.1 dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.

- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 8.1.

LK. 8.1. Menyusun Soal HOTS

Prosedur Kerja

1. Pilihlah salah satu materi pada modul kompetensi profesional yang paling Saudara kuasai!
2. Berdasarkan materi yang Saudara pilih, susunlah 3 soal HOTS dengan bentuk pilihan ganda!
3. Presentasikan soal-soal yang telah dibuat di depan kelas!
4. Analisislah soal-soal tersebut dengan menggunakan instrumen telaah soal yang tersedia!
5. Lakukan evaluasi dan refleksi terhadap soal sesuai dengan komentar dan saran dari fasilitator dan kelompok lain saat proses diskusi!

KARTU SOAL	
Jenjang	: Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: VII
Kompetensi	:
Level	: Pengetahuan dan Pemahaman
Materi	:
Bentuk Soal	: Pilihan Ganda
BAGIAN SOAL DISINI	
Kunci Jawaban	:



Kegiatan Pembelajaran 8

INSTRUMEN TELAAH SOAL HOTS

Nama Penyusun Soal :

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/semester : VII/Genap

No	Karakteristik	Butir Soal							
		1	2	3	4	5	6	7	dst
1	Soal menggunakan stimulus yang menarik (kebaruan, mendorong peserta didik untuk membaca)	√	√	√					
2	Soal menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll. Sesuai dengan dunia nyata)	√	√	√					
3	Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta) yang dalam penyelesaiannya dicirikan dengan tahapan proses berpikir berikut: a. Transfer satu konsep ke konsep lainnya b. Memproses dan menerapkan informasi c. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda d. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah e. Menelaah ide dan informasi secara kritis	√	√	√					
4	Jawaban tersirat dalam stimulus	√	√	√					

.....

Penelaah,

.....

NIP.





E. Soal/Tugas/Kasus

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Indikator soal yang dapat dikembangkan ke dalam level kognitif 3 adalah...
 - A. disajikan sebuah gambar perilaku norma, peserta didik dapat menunjukkan jenis norma.
 - B. disajikan sebuah peristiwa penerapan norma, peserta didik dapat menunjukkan perilaku penerapan norma kesopanan.
 - C. disajikan sebuah contoh sederhana penerapan norma, peserta didik dapat membedakan penerapan norma kesopanan dan norma kesusilaan.
 - D. disajikan fenomena tentang permasalahan penerapan norma hukum, peserta didik dapat menganalisis arti penting norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Perhatikanlah kriteria berikut ini!
 - 1) Kecakapan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar
 - 2) Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda
 - 3) Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya
 - 4) Kecapakan dalam berkomunikasiKriteria tersebut dikembangkan dalam jenis soal pada level...
 - A. Satu
 - B. Dua
 - C. Tiga
 - D. Empat

3. Penggunaan soal-soal *High Order Thinking skills* (HOTS) bertujuan untuk
 - A. membiasakan peserta didik untuk berfikir secara cepat dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru





Kegiatan Pembelajaran 8

- B. membiasakan peserta didik untuk bekerjasama dalam menyelesaikan latihan soal
 - C. membiasakan peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, sehingga dalam berbagai penilaian sumatif, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal dengan menggunakan soal HOTS.
 - D. membiasakan peserta didik untuk berperilaku tingkat tinggi, sehingga dalam berbagai penilaian sikap, guru dapat menilai dengan baik.
4. Perhatikan pernyataan berikut :
- 1) Menganalisis
 - 2) Menguji
 - 3) Menyelidiki
 - 4) Mengelola
 - 5) Membandingkan
 - 6) Membagi
- Yang termasuk kata kerja ranah pengetahuan pada level taksonomi “menganalisis” ditunjukkan pada nomor
- A. 1,2,3, dan 4
 - B. 1,2,3, dan 5
 - C. 1,2,5, dan 6
 - D. 2,3,4, dan 5
5. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam kartu soal dan kisi-kisi penulisan soal yaitu...
- A. penskoran soal hanya terdapat di dalam kartu soal
 - B. materi pembelajaran tidak dicantumkan dalam kartu soal
 - C. di kisi-kisi penulisan soal tidak terdapat Kompetensi Dasar
 - D. level kognitif soal hanya di tuliskan dalam kisi-kisi penulisan soal

F. Rangkuman

Kurikulum 2013 dipandang sebagai kurikulum yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan di era globalisasi, dengan penerapan HOTS pada kegiatan pembelajaran berlangsung.

1. Dengan penerapan HOTS, pada kegiatan pembelajaran melatih siswa untuk memiliki kompetensi memecahkan masalah yang kompleks dengan cara membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, komunikasi, serta kerja sama.
2. Penilaian pembelajaran soal HOTS memiliki beberapa peran, yakni:
 - a) Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyosong abad ke-21
 - b) Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah
 - c) Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik
 - d) Meningkatkan Mutu Penilaian
3. Dalam pelaksanaan penilaian HOTS, kata kerja operasional sangat penting untuk dipahami. Pada Kurikulum 2013, Kata Kerja yang digunakan adalah Taksonomi Bloom yang telah di sempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Aspek kognitif tersebut terdiri atas kemampuan mengetahui (knowing-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan (aplying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6).
4. Pembuatan soal dengan menggunakan High Order Thinking skills termasuk dalam level soal ketiga. Pada level ini menggunakan tingkatan berfikir kognitif 4 sampai kognitif 6 (menganalisis – mencipta). Untuk menjawab soal-soal pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin)

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 8, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini?



Kegiatan Pembelajaran 8

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 8.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 9. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 8 dengan baik.



Kegiatan Pembelajaran 9

Perencanaan Pembelajaran PPKn SMP

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep Pembelajaran,
2. Mendeskripsikan macam-macam pengalaman belajar
3. Menyusun rencana Pelaksanaan Pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini, peserta diklat dapat

1. Menjelaskan konsep Pembelajaran dengan baik
2. Mendeskripsikan macam-macam pengalaman Belajar dengan baik
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan benar

C. Uraian Materi

Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 disebutkan Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Dimiyati dan Mudjiono disebutkan Pembelajaran merupakan aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang disediakan. Menurut Slavin Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku seseorang individu yang disebabkan oleh sebuah pengalaman.



Karakteristik/Prinsip Pembelajaran dijelaskan Sesuai Konsep

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;
2. peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;
3. proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;
4. pembelajaran berbasis kompetensi;
5. pembelajaran terpadu;
6. pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi;
7. pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;
8. peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara *hard-skills* dan *soft-skills*;
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
11. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran;
13. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik; dan
14. suasana belajar menyenangkan dan menantang.

Pengertian Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah: (a) perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk kompetensi dasar (KD) pada kompetensi inti (KI)-3 dan KI-4; dan (b) perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2, yang kedua-duanya menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda, cirri-ciri khusus dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan harus spesifik. Artinya indikator tersebut harus dapat diamati dan diukur. Diamati perubahan kemampuan, sikap atau perilakunya dan dapat diukur kemampuan menguasai materi pembelajarannya.

Pengalaman Belajar

Kurikulum Tahun 2013 menggunakan pendekatan saintifik, tentu terjadi pengalaman-pengalaman belajar bagi peserta didik yang berbeda dengan pendekatan lain. Hal ini disebabkan karena setiap pendekatan pembelajaran memiliki langkah-langkah yang berbeda.

Pengalaman belajar maksudnya aktivitas yang harus dilalui atau dialami anak didik satuan pembelajaran tertentu. Misalnya untuk membahas suatu topik tertentu pengalaman belajar apa yang harus dilalui anak didik atau kegiatan apa yang harus dilakukan anak didik.

Hakikat RPP

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas



Kegiatan Pembelajaran 16

pendidikan atau kantor kementerian agama setempat.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat

Prinsip Penyusunan RPP .

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan (ambil permendikbud tahun 2016) pembelajaran (RPP) sebagai berikut:

- 1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- 4) Berpusat pada peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

- 5) Berbasis konteks
Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
- 6) Berorientasi kekinian
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- 7) Mengembangkan kemandirian belajar
Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- 8) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 9) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 10) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 11) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- 12) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi

Komponen dan sistematika RPP

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran paling sedikit memuat (ambil permendikbud tahun 2016)

- a. Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- b. Identitas Mata Pelajaran atau tema/sub tema
- c. Kelas/Semester
- d. Alokasi Waktu



Kegiatan Pembelajaran 16

- e. KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi
- f. Materi Pembelajaran
- g. Kegiatan Pembelajaran
- h. Penilaian Pembelajaran
- i. Media/Alat, Bahan dan Sumber belajar

Selanjutnya, dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, bahwa Komponen RPP terdiri atas :

- a. Identitas Sekolah, yaitu nama satuan pendidikan
- b. Identitas Mata Pelajaran
- c. Kelas/ Semester
- d. Materi Pokok
- e. Alokasi Waktu
- f. Tujuan Pembelajaran
- g. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
- h. Materi Pembelajaran
- i. Metode Pembelajaran
- j. Media
- k. Sumber Belajar
- l. Langkah-Langkah Pembelajaran (Tahapan Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Penutup)
- m. Penilaian Hasil Pembelajaran

Kedua Permendikbud tersebut sama-sama membahas komponen RPP. Berdasarkan kedua Permendikbud tersebut RPP dapat dikembangkan menggunakan tiga alternatif (Kemdikbud, 2017:7) yakni :

- a. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014,
- b. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
- c. Memadukan komponen dari dua Permendikbud (saling melengkapi)

Keterangan

- a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. Kelas/semester;
- d. Materi pokok;

- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- f. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran dan indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m. Penilaian hasil pembelajaran.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Moda Tatap Muka Penuh

- a. Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- b. Peserta secara individu membaca cerdas materi pembelajaran.
- c. Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.
- d. Peserta mengerjakan LK 9.1 secara kelompok.
- e. Peserta menyajikan hasil kerja kelompok dan peserta lain menyampaikan pertanyaan, saran, dan komentar. Sedangkan fasilitator memberikan klarifikasi dan konfirmasi berdasarkan hasil pengamatannya.
- f. Peserta dan fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.
- g. Fasilitator melakukan refleksi, memberikan umpan balik, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut.

2. Moda Tatap Muka In-On-In

a. Aktivitas In -1

- 1) Peserta membagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan
- 2) Peserta diklat membaca cerdas materi modul.
- 3) Peserta berdiskusi tentang materi yang disajikan. Diskusi dilakukan dengan kerjasama setiap anggota kelompok. Diharapkan peserta berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat yang berbeda serta berkomitmen atas keputusan hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok.

b. Kegiatan on

Peserta diklat mengerjakan LK 9.1 secara mandiri sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

c. Kegiatan In -2

- 1) Peserta mempresentasikan hasil pekerjaan LK 9.1 dan peserta lain memberikan pertanyaan, saran, dan komentar.
- 2) Peserta berani memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya dan menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta bersama fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.

- 4) Peserta bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 5) Merencanakan kegiatan tindak lanjut.

LK 9.1

Susunlah sebuah RPP dengan singkat dan jelas mengacu pada format di bawah ini!

No	Komponen	Keterangan
1.	a. Data Sekolah b. Mata Pelajaran c. Kelas/Semester d. Materi Pokok e. Alokasi Waktu	
2.	Tujuan Pembelajaran	
3.	Kompetensi Inti	
4.	Kompetensi Dasar	
5.	Indikator Pencapaian Kompetensi	
6.	Materi Pembelajaran	
7.	Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran	
8.	Media dan Sumber Belajar	
9.	Langkah-Langkah Pembelajaran a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti c. Kegiatan Penutup	
10.	Penilaian Hasil Pembelajaran	

E. Latihan Kerja/Tugas/kasus

Pilih jawaban yang paling benar dengan cara memberi silang (X) pada huruf jawaban A, B, C, dan D

1. Prinsip penyusunan RPP harus memuat secara utuh
 - A. kognitif, afektif dan psikomotor
 - B. sosial, intelektual dan konseptual
 - C. pengetahuan, sikap moral dan keterampilan sosial
 - D. sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan
2. Komponen RPP yang membedakan antara Permendikbud 103 Tahun 2014 dengan Permendikbud 22 tahun 2016 adalah....
 - A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
 - B. Materi Pembelajaran
 - C. Tujuan Pembelajaran
 - D. Sumber Belajar
 - E. Penilaian
3. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk kepentingan
 - A. proses pembelajaran
 - B. penilaian hasil belajar
 - C. strategi pembelajaran
 - D. pendekatan pembelajaran
4. Salah satu prinsip penyusunan RPP yang mendorong timbulnya motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, kemandirian dan semangat belajar adalah
 - A. berorientasi pada materi
 - B. berpusat pada peserta didik
 - C. mengembangkan kemandirian belajar
 - D. memperhatikan perbedaan individu

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan RPP yang telah disusun, tergantung pada penyesuaian rancangan tersebut dengan kondisi
 - A. Kelas
 - B. Kemampuan guru
 - C. Lingkungan Sekolah
 - D. Sarana dan Prasarana

F. Rangkuman

1. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.
2. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar.
3. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai berikut: Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
4. RPP dapat dikembangkan menggunakan tiga alternatif, yakni:
 - a) Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014,
 - b) Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
 - c) Memadukan komponen dari dua Permendikbud (saling melengkapi)
5. Penyusunan RPP disusun sesuai dengan mekanisme dan kaidah yang ada yang memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1) Umpan Balik

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 10, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
2. Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang Saudara peroleh dan akan Saudara kembangkan dalam pembelajaran di kelas?
3. Apa manfaat yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi di atas?
4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

2) Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan tes formatif di atas, cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Kemudian hitunglah jawaban benar, gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi Kegiatan Pembelajaran 9.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{jumlah soal}) \times 100\%$$

Keterangan: 90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70 % = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, maka Saudara disilahkan meneruskan kegiatan pembelajaran 10. Namun jika tingkat penguasaan Saudara masih di bawah 80%, sebaiknya Saudara mempelajari kembali kegiatan pembelajaran 9 dengan baik.



Evaluasi

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 10 butir soal Kompetensi Pedagogi dan 20 butir soal Kompetensi Profesional.
- c. Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- d. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- e. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- f. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- A. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- B. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. PPKn mencakup dimensi keterampilan kewarganegaraan yang materinya berisi
 - A. sikap terhadap pemilu
 - B. pemecahan masalah sosial
 - C. pemahaman konstitusi negara
 - D. pemahaman hak asasi manusia



2. Apabila peserta didik diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka dimensi yang dikembangkan adalah ...
 - A. *Civic skill*
 - B. *Civic confident*
 - C. *Civic disposition*
 - D. *Civic knowledge*

3. Tahapan penting pada saat pembahasan rumusan dasar Negara terjadi pada saat
 - A. Sidang PPKI
 - B. Sidang BPUPKI I
 - C. Sidang BPUPKI II
 - D. Sidang Panitia kecil

4. Penerapan Pancasila sebagai dasar Negara diwujudkan dalam
 - A. sistem pemerintahan Indonesia
 - B. sistem pemilihan ketua umum partai politik
 - C. struktur organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat
 - D. kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR

5. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari
 - A. Pembukaan dan Pasal-Pasal serta Penjelasan
 - B. Aturan Tambahan serta Penjelasan Pembukaan dan Pasal-Pasal
 - C. Pembukaan, Batang Tubuh, empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat tambahan
 - D. Pembukaan, Batang Tubuh, empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan

6. Menurut Soekarno, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan sebagai konstitusi revolusi, karena
 - A. perumusan dilakukan dalam situasi perang dan dalam waktu yang singkat
 - B. perumusan dilakukan oleh sekelompok panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI
 - C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengandung pokok-pokok saja
 - D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh PPKI, bukan oleh Konstituante

7. Indonesia mendesak PBB untuk segera mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Hal tersebut sesuai dengan isi dan makna dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat

8. Fungsi dan tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ...
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat

9. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut, *kecuali...* .
 - A. Kedudukan MPR dan DPR sejajar
 - B. Presiden sebagai pemegang kedaulatan rakyat
 - C. MPR tidak lagi mejadi lembaga tertinggi negara
 - D. Lembaga-lembaga tinggi negara saling mengawasi

10. Pentingnya konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara salah satunya diwujudkan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Berikut ini hal-hal yang menunjukkan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah *kecuali...*
 - A. pembubaran organisasi masyarakat yang tidak sejalan dengan agenda kerja pemerintahan
 - B. pembubaran partai politik yang terbukti melanggar ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia
 - C. sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur UUD diselesaikan Mahkamah Konstitusi
 - D. tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan

11. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia sesungguhnya memiliki derajat dan martabat yang sama, oleh karenanya itu manusia memiliki....
 - A. Jabatan yang sama
 - B. Keahlian yang sama
 - C. Hak-hak dasar yang sama
 - D. Hak dan kewajiban yang sama

12. Jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat

13. Norma kesusilaan bersifat universal dalam arti bebas dari dimensi ruang dan waktu, dan bersumber pada....
 - A. budaya
 - B. masyarakat
 - C. adat-istiadat
 - D. hati nurani manusia

14. Materi muatan yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah
 - A. materi untuk menjalankan Undang-Undang
 - B. pengesahan perjanjian internasional tertentu
 - C. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang
 - D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah

15. Arti penting hukum bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah....
 - A. menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat
 - B. mengendalikan perilaku/ tingkah laku masyarakat
 - C. mengatur pergaulan hidup bermasyarakat
 - D. membatasi kebebasan masyarakat

16. Ketika seseorang membayar pajak, maka pada prinsipnya ia menaati aturan hukum dalam kehidupan ...
 - A. Nasional
 - B. Keluarga
 - C. Bernegara
 - D. Bermasyarakat

17. Pentingnya keberagaman sosial-budaya sebagai modal dasar dan motivasi untuk
- A. terbentuknya masyarakat madani
 - B. terciptanya kerukunan dalam membangun NKRI
 - C. terwujudnya pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata
 - D. semangat melakukan aktivitas sehari-hari demi kemakmuran bersama
18. Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi perekat keberagaman jika keberagaman dipandang sebagai
- A. tujuan hidup bersama
 - B. potensi konflik antar sesama
 - C. potensi dan kekayaan bersama
 - D. kenyataan yang terpaksa harus diterima
19. Unsur konstitutif berdirinya sebuah negara terdiri dari ...
- A. rakyat, wilayah, dan pengakuan dari PBB
 - B. rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain
 - C. rakyat, wilayah, dan pernyataan Proklamasi
 - D. rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
20. Peran setiap daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah
- A. berjuang untuk kemajuan daerahnya
 - B. berjuang bersama-sama seluruh daerah
 - C. berjuang bersama-sama daerah sekitarnya
 - D. berjuang untuk mempertahankan daerahnya

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGI

21. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP yang menuntut siswa untuk mengemukakan pengetahuan yang diperolehnya adalah ...
- A. Menanya
 - B. Mengamati
 - C. Mengkomunikasikan
 - D. Mengumpulkan Informasi
22. Guru menayangkan video “pelanggaran lalu lintas di jalan raya”, yang dilanjutkan dengan kegiatan stimulasi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa keingintahuan peserta didik, guru memfasilitasinya dengan kegiatan
- A. Menanya
 - B. Mengamati
 - C. Mengasosiasi
 - D. Mengumpulkan
23. Karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah adalah menjadikan masalah sebagai acuan utama dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu contoh masalah pembelajaran PPKn SMP yang bisa ditindaklanjuti dengan penerapan model ini adalah
- A. kerusakan hutan di daerah setempat
 - B. kesemrawutan lalu lintas di depan sekolah
 - C. keterbatasan buku teks dalam pembelajaran
 - D. tingkah laku guru dan peserta dalam pembelajaran

24. Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi atas permasalahan dunia nyata, maka penerapan model pembelajarannya adalah
- A. *problem based learning*
 - B. *project based learning*
 - C. *discovery learning*
 - D. *inquiry learning*
25. "Suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes", merupakan pengertian dari...
- A. RRP
 - B. Silabus
 - C. kartu soal
 - D. kisi-kisi penulisan soal
26. Perhatikan pernyataan berikut :
- 1) Menganalisis
 - 2) Menguji
 - 3) Menyelidiki
 - 4) Mengelola
 - 5) Membandingkan
 - 6) Membagi
- Yang termasuk kata kerja ranah pengetahuan pada level taksonomi "menganalisis" ditunjukkan pada nomor
- A. 1,2,3, dan 4
 - B. 1,2,3, dan 5
 - C. 1,2,5, dan 6
 - D. 2,3,4, dan 5
27. Bacalah pernyataan berikut :
- 1) Menganalisis Kompetensi Dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS
 - 2) Menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi
 - 3) Mencari sumber dan merumuskan stimulus sesuai indikator soal
 - 4) Memperhatikan kriteria Penulisan butir soal

5) Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban

Agar meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyusunan soal. Penulis haruslah menyusun soal berdasarkan langkah-langkah pembuatan soal dengan baik dan benar. Hal tersebut ditunjukkan pada nomor

- A. 1,2,3, dan 4
- B. 1,2,4, dan 5
- C. 1,3,4, dan 5
- D. 2,3,4, dan 5

28. Proses pembelajaran di kelas dalam mewujudkan ketercapaian kompetensi dasar hendaknya dilakukan berpedoman pada

- A. LKS
- B. RPP
- C. Indikator
- D. lembar pengamatan

29. data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar disebut...

- A. alat belajar
- B. sumber belajar
- C. media belajar
- D. teknologi pembelajaran

30. Gambar, foto, majalah dinding, LCD, dan film merupakan contoh dari ...

- A. alat belajar
- B. alat bantu belajar
- C. media pembelajaran
- D. teknologi pembelajaran

**KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN PEMBELAJARAN****Kegiatan Pembelajaran 1**

- 1 A Mencoba kembali memasukkan pendidikan moral dan budi pekerti
- 2 B hak-hak dan kewajiban
- 3 D mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan; dan keterampilan kewarganegaraan
- 4 D Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
- 5 A Pengertian Hak Asasi Manusia

Kegiatan Pembelajaran 2

- 1 B dasar negara Indonesia
- 2 D 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh PPKI dimana UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI
- 3 A Kesejahteraan rakyat
- 4 D berbicara setelah dipersilahkan moderator
- 5 B 1 dan 2

Kegiatan Pembelajaran 3

- 1 B Pembukaan UUD 1945 adalah kristalisasi dari cita-cita proklamasi kemerdekaan
- 2 A Pertama
- 3 D dorongan yang kuat perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan Keberhasilan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”
- 4 C Pembukaan UUD 1945
- 5 D Pembukaan merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kegiatan Pembelajaran 4

- 1 C negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat





Evaluasi

- 2 C Undang Undang
- 3 D melaksanakan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap pemerintahan
- 4 C memilih Presiden dan Wakil Presiden
- 5 C tetap sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib diundangkan

Kegiatan Pembelajaran 5

- 1 A Bhinneka Tunggal Ika
- 2 A milik bersama seluruh bangsa Indonesia
- 3 C melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik
- 4 B menciptakan kerukunan dalam membangun NKRI
- 5 A berbeda dalam persatuan

Kegiatan Pembelajaran 6

- 1 D Proklamasi mengakhiri perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
- 2 B pengakuan negara lain
- 3 B Hakikat NKRI
- 4 D pelanggaran wilayah
- 5 A wajib dihormati oleh negara negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional.

Kegiatan Pembelajaran 7

- 1 B berdasar pada bukti dari obyek yang dapat diobservasi, empiris, terukur
- 2 D 2, 3, dan 4
- 3 B kesemrawutan lalu lintas di depan sekolah
- 4 D menghadapkan peserta didik pada sesuatu yang membingungkan agar timbul keinginan untuk menyelidiki

permasalahannya

- 5 D penentuan pertanyaan mendasar

Kegiatan Pembelajaran 8

- 1 D disajikan fenomena tentang permasalahan penerapan norma hukum, peserta didik dapat menganalisis arti penting norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 2 C Tiga
- 3 C membiasakan peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, sehingga dalam berbagai penilaian sumatif, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal dengan menggunakan soal HOTS.
- 4 C 1,2,5, dan 6
- 5 A penskoran soal hanya terdapat di dalam kartu soal

Kegiatan Pembelajaran 9

- 1 D sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan
- 2 C Tujuan Pembelajaran
- 3 A proses pembelajaran
- 4 B berpusat pada peserta didik
- 5 A Kelas



Evaluasi

KUNCI JAWABAN EVALUASI

1	B
2	D
3	B
4	A
5	D
6	A
7	A
8	D
9	B
10	A

11	C
12	A
13	D
14	A
15	A
16	C
17	B
18	C
19	D
20	B

21	C
22	A
23	B
24	A
25	D
26	C
27	C
28	B
29	B
30	C



Penutup

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi A bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

Daftar Pustaka

- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalini Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Angga's:tujuan Negara dan fungsi negara:(Ardiansyah), <http://krsmwn.blogspot.com/2013/09/tujuan-negara-dan-fungsi-negara-menurut-para-ahli.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Noor. (Drs. H.M.)ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Pustaka Setia: Bandung 2007.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Gabriella Aningtyas Varianggi:pengertian bangsa dan negara:(Ardiansyah), <http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/05/13/pengertian-negara/>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Juna dinasthi: system pemerintaha indonesia:(Ardiansyah), <http://sistem-pemerintaha-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>:(Diakses pada tanggal 20 april 2014)



Daftar Pustaka

- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Jakarta: Bumi Nusantara
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*, Jakarta: KEMENDIKBUD-RI .
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Modul Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skill*
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan*
- Kusuma, R M. A. B (ed), Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Ootentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persipan Kemerdekaan, Depok :UI Press, 2004
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mas'oeed, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, Suparman. 2007. *Makalah UPAYA LITIGASI & NON LITIGASI ATAS PELANGGARAN HAK EKOSOB DI INDONESIA*
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
- Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standart Penilaian Pendidik.
- Pranarka. A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Prabaswara I Made, "Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa dan Renungan Suci Bali untuk Indonesia" dalam *Bali Post Online*, 2 Maret 2003.
- Raden Roro Herliani. 2017. *Karakteristik Soal HOTS*. (On Line).
- Santoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana* 1975:578. New Delhi: International Academy of Culture
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancaila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2006. *Materi Sosialisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, S, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Surya Saputra, Lukman, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.



Daftar Pustaka

- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiriatmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.
- www.youtube.com/watch?v=167AkE5MWf0), diakses pada 09 Mei 2018. Puspendik
- Yasni. Z. *Bung Hatta's Answers: Interview: Interviews Dr. Mohammad Hatta With Dr. Z. Yasni*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta
- , 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- , 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
(PPKn)

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

TERINTEGRASI PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER
DAN PENGEMBANGAN SOAL



Kelompok
Kompetensi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2018

Jalan Jendral Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Fax: (021) 5797 4130

www.gtk.kemdikbud.go.id